



LAPORAN KINERJA

TRIWULAN I
2023



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN (BPPP) BANYUWANGI**

KATA PENGANTAR



Laporan Kinerja (LKj) Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi Triwulan I Tahun 2023 ini disusun, selain sebagai pemenuhan ketentuan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi, sekaligus juga merupakan salah satu bentuk pertanggungjawaban kinerja BPPP Banyuwangi dalam melaksanakan program dan kegiatan pelatihan dan penyuluhan perikanan di

wilayah kerja BPPP Banyuwangi sampai dengan Triwulan I Tahun Anggaran 2023. Laporan Kinerja ini disusun dari hasil pengukuran kinerja sampai dengan periode Triwulan I TA 2023 untuk memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pimpinan selaku pemberi mandat atas kinerja yang telah dan harus dicapai, juga sebagai bahan evaluasi dalam upaya perbaikan berkelanjutan dalam rangka peningkatan kinerja BPPP Banyuwangi.

Secara umum seluruh indikator kinerja BPPP Banyuwangi yang diukur pada Triwulan I Tahun 2023 telah tercapai bahkan melebihi target Triwulan I Tahun 2023. Capaian kinerja positif BPPP Banyuwangi periode Triwulan I Tahun 2023 antara lain adalah 1). Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang) dengan capaian 2.074 orang dari target sebesar 1.590 orang, 2). Nilai PNBP Satker Lingkup Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP (Rupiah Milyar) dengan capaian 0,12 (Rupiah Milyar) dari target sebesar 0,11 (Rupiah Milyar), 3) Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang) dengan capaian 20 orang dari target 20 orang, 4). Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh (Kelompok) dengan capaian 1.507 kelompok dari target 1.300 orang, 5). Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk (Kelompok) dengan capaian 78 kelompok dari target 78 kelompok, 6). Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%) dengan capaian 35,71% dari target 30 %, 7). Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%) dengan capaian 100 % dari target 92 %. 8). Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%) dengan capaian 75 % dari target 75 %. Pencapaian yang baik pada periode Triwulan I Tahun 2023 tersebut patut kita syukuri, namun demikian pencapaian tersebut masih awal dan perlu diikuti dengan peningkatan dan pengawalan atas capaian kinerja untuk seluruh Indikator Kinerja BPPP Banyuwangi ke depan sampai dengan berakhirnya Tahun 2023. Komitmen dan kerjasama semua pihak, baik jajaran internal BPPP Banyuwangi maupun dengan pihak lainnya perlu dijaga untuk mencapai kinerja yang telah ditargetkan.

Kami sampaikan terima kasih dan apresiasi kepada semua pihak, baik internal maupun eksternal BPPP Banyuwangi atas tersusunnya Laporan ini. Kami sadari, apa yang telah kami kerjakan belumlah sempurna, untuk itu kami harapkan masukan dan kritik membangun untuk penyempurnaan laporan kami kedepan. Semoga Laporan Kinerja Triwulan I Tahun 2023 ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan.

Banyuwangi, 14 April 2023
Kepala BPPP Banyuwangi,



Achmad Subijakto

IKHTISAR EKSEKUTIF

BPPP Banyuwangi dalam rencana kerjanya akan memfokuskan dukungan pada kinerja Kementerian Kelautan dan Perikanan yang diimplementasikan dalam bentuk sasaran kinerja pada setiap tahunnya. Sasaran kinerja BPPP Banyuwangi mengacu kepada Sasaran Strategis (SS) KKP yaitu "Tatakelola pemerintahan yang baik". Untuk mencapai Sasaran Kinerja tersebut, pada Triwulan I tahun 2023 BPPP Banyuwangi menetapkan 7 Sasaran Strategis (SS) dengan 22 Indikator Kinerja yang telah menjadi Perjanjian Kinerja antara BPPP Banyuwangi dengan Badan Riset dan Sumber Daya Manusia. Sasaran Strategis tersebut adalah 1) Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan; 2) Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan; 3) Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP; 4) Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; 5) Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP; 6) Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan; 7) Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker. Guna mencapai Sasaran Kinerja yang diharapkan, BPPP Banyuwangi melakukan pemantauan perkembangan pencapaian kinerja secara periodik (Triwulanan).

Sampai dengan akhir Triwulan I Tahun 2023, jumlah indikator kinerja yang dapat diukur sebanyak 8 indikator yang merupakan indikator pada SS-1, SS-2, SS-4, SS-6 dan SS-7. Berdasarkan pengukuran kinerja yang terdapat dalam Aplikasi Kinerjaku (kinerjaku.kkp.go.id), capaian Skor Kinerja IKU per Triwulan I Tahun 2023 adalah 106,94 atau masuk dalam kriteria baik (hijau). Secara keseluruhan indikator kinerja yang harus diukur pada Triwulan I dapat tercapai sesuai dan melebihi target yang telah ditetapkan. Secara rinci, kondisi capaian kinerja BPPP Banyuwangi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 disajikan pada tabel berikut.

Tabel capaian IKU BPPP Banyuwangi KKP yang diukur s.d. Triwulan I Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	No. IKU dan IKU	Triwulan I Tahun 2023				
			Target	Realisasi	% Capaian	Nilai Penyesuaian atas Capaian	
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%)	0	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	1.590	2.074	120	120
		3	Nilai PNPB BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	0,11	0.12	109,9	109,9
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang)	20	20	100	100
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Banyuwangi (orang)	0	0	0	0
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Banyuwangi (paket)	0	0	0	0

4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	1.300	1.507	115,92	115,92
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	0	0	0	0
		9	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	78	78	100	100
		10	Tenaga kerja yang terlibat di BPPP Banyuwangi (orang)	0	0	0	0
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas)	0	0	0	0
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	0	0	0	0
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	0	0	0	0
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	30	35,71	119,03	119,03
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi (Nilai)	0	0	0	0
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%)	92	100	108,70	108,70
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	0	0	0	0
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Banyuwangi dibandingkan realisasi anggaran BPPP Banyuwangi TA. 2022 (%)	0	0	0	0
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	75	75	100	100
		20	Nilai PM SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	0	0	0	0
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	0	0	0	0

Keterangan: Nilai capaian maksimal pada aplikasi kinerja dibatasi 120%

Adapun dari sisi anggaran, pada periode Triwulan I Tahun 2023 BPPP Banyuwangi telah merealisasikan anggaran sebesar Rp. 15.867.483.637 atau 17,45% dari pagu yang dikelola sebesar Rp. 90.926.508.000,00. Dengan demikian, dapat disampaikan bahwa capaian kinerja BPPP Banyuwangi sampai dengan Triwulan I Baik. Namun, untuk menjaga dan meningkatkan capaian kinerja pada periode selanjutnya, perlu dilakukan dalam rangka pengendalian.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	i
IKHTISAR EKSEKUTIF	ii
DAFTAR ISI	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Dasar Hukum	2
1.3. Tugas dan Fungsi	2
1.4. Struktur Organisasi.....	3
1.5. Keragaan SDM BPPP Banyuwangi.....	3
1.6. Dasar Pengukuran Kinerja	4
1.7. Tujuan Pengukuran Kinerja.....	4
1.8. Ruang Lingkup.....	4
1.9 Waktu Pengukuran Kinerja	4
1.10. Sistematika Laporan	4
BAB 2 PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA	6
2.1 Rencana Strategis KKP dan BPPP Banyuwangi KKP 2020 – 2024	6
2.2 Sasaran Strategis.....	8
2.3 Potensi dan Permasalahan.....	8
2.4 Strategi Pelaksanaan Program Kerja BPPP Banyuwangi.....	10
2.5 Rencana Kinerja Tahunan.....	11
BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA	16
3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama I Tahun 2023,.....	16
3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja	17
3.3 Akuntabilitas Keuangan	63
3.4 Efisiensi Keuangan	64
BAB 4 PENUTUP	68
4.1 Kesimpulan	68
4.2 Permasalahan dan Rekomendasi	68
LAMPIRAN	68

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Sebagai upaya mendukung Terwujudnya Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong Royong melalui Pembangunan Politik, Hukum, Pertahanan dan Keamanan (Polhukhankam) Indonesia yang diarahkan menuju terwujudnya konsolidasi demokrasi; supremasi hukum, penegakan hak asasi manusia; birokrasi yang bersih dan terpercaya; rasa aman dan damai bagi seluruh rakyat; serta keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kedaulatan negara dari berbagai ancaman, baik dari dalam maupun luar negeri. Kondisi tersebut merupakan prasyarat untuk mendukung terlaksananya pembangunan nasional. Beberapa isu domestik yang perlu diwaspadai adalah intoleransi, demokrasi prosedural, kesenjangan tingkat reformasi birokrasi, perilaku koruptif, dan potensi ancaman keamanan dan kedaulatan Negara.

Arah Kebijakan dan Strategi dalam Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola salah satu pilarnya adalah Reformasi sistem akuntabilitas kinerja, melalui penguatan akuntabilitas kinerja organisasi dan reformasi sistem perencanaan dan penganggaran serta pengawasan.

Namun demikian, masih terdapat permasalahan pada tatanan birokrasi, seperti: pelanggaran disiplin, penyalahgunaan wewenang dan maraknya praktek KKN, rendahnya kinerja sumber daya manusia aparatur, sistem kelembagaan dan ketatalaksanaan pemerintahan yang belum memadai, rendahnya efisiensi dan efektivitas kerja, serta rendahnya kualitas pelayanan umum.

Untuk itu, diperlukan upaya keras dan sistematis untuk memperbaikinya. Pembangunan birokrasi yang kuat merupakan elemen penting dan diperlukan juga terobosan kinerja secara terpadu, penuh integritas, akuntabel, taat kepada hukum yang berwibawa, dan transparan. Hal-hal tersebut penting karena bermuara pada pencapaian cita-cita pembangunan nasional untuk terwujudnya peningkatan kesejahteraan rakyat.

1.2 DASAR HUKUM

BPPP Banyuwangi melaksanakan tugas dan fungsi, antara lain berdasarkan:

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan;
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.

1.3 TUGAS DAN FUNGSI

Sesuai Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : PER.87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan, BPPP Banyuwangi memiliki tugas menyelenggarakan peningkatan kompetensi pelaku usaha dan pelaku utama melalui pelatihan dan penyuluhan kelautan dan perikanan. BPPP Banyuwangi dalam melaksanakan tugasnya menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

1. Penyusunan, pemantauan, dan evaluasi rencana, program, dan anggaran, serta pelaporan dibidang pelatihan dan penyuluhan;
2. Penyusunan bahan kebijakan pelatihan dan penyuluhan;
3. Pelatihan teknis dan manajerial dibidang perikanan;
4. Penyusunan materi, metodologi, dan pelaksanaan penyuluhan perikanan;
5. Pemantauan kebutuhan pembentukan jaringan pengembangan tenaga teknis dan manajerial dibidang perikanan;
6. Pengelolaan prasarana dan sarana pelatihan dan penyuluhan;
7. Pengembangan dan fasilitasi kelembagaan dan forum masyarakat bagi pelaku utama dan pelaku usaha;
8. Penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh pegawai negeri sipil, swadaya, dan swasta; dan
9. Pelaksanaan urusan ketatausahaan.

1.4 STRUKTUR ORGANISASI

Berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 87/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan, Struktur Organisasi di BPPP Banyuwangi dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1. Struktur Organisasi BPPP Banyuwangi

1.5 KERAGAAN SDM BPPP BANYUWANGI

Jumlah pegawai negeri sipil di BPPP Banyuwangi per 01 April 2023 sebanyak 697 orang dengan rincian komposisi pegawai sebagai berikut:

No	Nama Jabatan	Jumlah
1.	Kepala Balai	1
2.	Kepala Sub Bagian Umum	1
3.	Instruktur	21
4.	Widyaiswara	3
5.	Analisis kepegawaian	0
6.	Analisis pengelola keuangan APBN	2
7.	Pranata Keuangan APBN	3
8.	Fungsional Umum	90
9.	Penyuluh Perikanan PNS	277
10.	Penyuluh Perikanan Bantu (PPB)	210
11.	PPPK	67
Total		697

Gambar 2. Komposisi Pegawai BPPP Banyuwangi

1.6 DASAR PENGUKURAN KINERJA

1. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 7/PERMEN-KP/2021 tentang Tata Kelola Pengawasan Intern di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan.
2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor : 48/PERMEN-KP/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kelautan dan Perikanan.
4. Peraturan Kementerian PAN dan RB No. 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja.
5. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) BPPP Banyuwangi Nomor : SP DIPA- 032.02.1.622098/2023 tanggal 17 November 2022.

1.7 TUJUAN PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja bertujuan untuk:

1. Menilai capaian kinerja yang telah dicapai BPPP Banyuwangi sampai dengan Triwulan I Tahun 2023 sesuai yang tercantum dalam dokumen penetapan kinerja.
2. Menilai capaian upaya untuk pencapaian Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Kegiatan pelatihan, penyuluhan dan manajemen internal .

1.8 RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Evaluasi kinerja mencakup pengukuran dokumen Penetapan Kinerja (Tapja) BPPP Banyuwangi dan Perjanjian Kinerja yang diperoleh dari Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan.

1.9 WAKTU PENGUKURAN KINERJA

1. Periode yang dinilai : Januari s.d. Maret 2023
2. Waktu pelaksanaan penilaian : April 2023

1.10 SISTEMATIKA LAPORAN

Sistematika penyusunan laporan meliputi :

1. Pendahuluan yang mencakup latar belakang, dasar hukum, tugas dan fungsi, ruang lingkup dan metodologi pengukuran kinerja;
2. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja mencakup Renstra BPPP Banyuwangi, Rencana Kinerja, Penetapan Kinerja, dan Rencana Aksi Pencapaian IKU;

3. Akuntabilitas Kinerja yang berisi mengenai pengelolaan kinerja BPPP Banyuwangi, Capaian Kinerja Triwulan I Tahun 2023 dan Realisasi Rencana Aksi s.d. Triwulan I Tahun 2023;
4. Penutup yang berisi mengenai kesimpulan, kendala/permasalahan dan saran untuk perbaikan kinerja.

BAB 2

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

2.1 RENCANA STRATEGIS KKP DAN BPPP BANYUWANGI TAHUN 2020 - 2024

Sejalan dengan perkembangan dunia global dan dinamika organisasi yang ada di KKP, Rencana Strategis KKP mengalami beberapa perubahan. Penyusunan Rancangan Renstra KKP 2020-2024 menjadi dasar bagi unit Eselon I dibawahnya untuk melakukan penajaman terkait dengan Sasaran Strategis (SS) dan Indikator Kinerja Utama (IKU) sejalan dengan diterapkannya pengelolaan kinerja berbasis *Balanced Scorecard* (BSC) di lingkungan KKP.

Adapun Visi-Misi KKP berdasarkan Rancangan Renstra 2020-2024 dan turunannya pada BPPP Banyuwangi sebagai bagian dari unit Eselon III di bawahnya dapat disampaikan sebagai berikut:

2.1.1 Visi KKP dan BPPP Banyuwangi KKP

Rancangan Visi KKP, adalah keadaan yang ingin dicapai oleh KKP selama 5 (lima) tahun yang merupakan perwujudan Visi Presiden yang gambaran menyeluruh mengenai peranan dan fungsi KKP adalah:

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan untuk mewujudkan Indonesia Maju yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian, berlandaskan Gotong Royong”

Visi tersebut agar dapat mewujudkan masa depan bangsa Indonesia yang mampu mengandalkan kemampuannya untuk dapat bersaing dengan bangsa lain. Untuk mendukung visi KKP tersebut, BPPP Banyuwangi merancang visinya sebagai berikut :

“Terwujudnya Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang Sejahtera dan Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang Berkelanjutan”

Visi tersebut dilatarbelakangi oleh adanya keinginan seluruh pegawai BPPP Banyuwangi dan komitmen pimpinan yang kuat terhadap pelaksanaan tata pemerintahan yang bersih dan berwibawa dengan menjunjung tinggi prinsip mewujudkan masyarakat kelautan dan perikanan yang sejahtera dan sumber daya kelautan dan perikanan yang berkelanjutan dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi KKP.

Pernyataan visi tersebut merupakan idealisme, cita-cita, dan harapan dari segenap personil BPPP Banyuwangi. Disamping komitmen dan profesionalitas, juga diperlukan dukungan dan kerjasama yang konstruktif dari mitra kerja lingkup KKP.

2.1.2 Misi BPPP Banyuwangi

Misi BPPP Banyuwangi dirancang sebagai rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi BPPP Banyuwangi, yaitu:

- a. Peningkatan Kualitas SDM KP melalui Peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan;*
- b. Struktur Ekonomi Yang Produktif, Mandiri, dan Berdaya Saing melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung peningkatan Kontribusi Ekonomi Sektor Kelautan dan Perikanan terhadap Perekonomian Nasional;*
- c. Mencapai Lingkungan Hidup Yang Berkelanjutan melalui pelatihan dan penyuluhan KP guna mendukung Sumber Daya Kelautan dan Perikanan yang lestari;*
- d. Pengelolaan Pemerintahan yang Bersih, Efektif, dan Terpercaya melalui Peningkatan Tata Kelola Pemerintahan di KKP.*

Dalam misi tersebut, semakin jelas komitmen BPPP Banyuwangi dalam mengawal pelaksanaan program-program KKP antara lain: Peningkatan Kehidupan Nelayan, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat Kelautan dan Perikanan, serta Industrialisasi Kelautan dan Perikanan. Hal tersebut diperlukan demi meningkatkan kinerja KKP yang memiliki visi Pembangunan Kelautan dan Perikanan yang Berdaya Saing dan Berkelanjutan untuk Kesejahteraan Masyarakat.

2.1.3 Tujuan BPPP Banyuwangi

Tujuan strategis disusun berdasarkan hasil identifikasi potensi dan permasalahan yang dihadapi dalam rangka mewujudkan visi dan melaksanakan misi BPPP Banyuwangi. Adapun tujuan strategis BPPP Banyuwangi adalah:

- a. Menghasilkan SDM profesional dan berdaya saing guna mewujudkan pembangunan sektor KP berkelanjutan, didukung tata kelola pemerintahan yang bersih dan melayani.*
- b. Meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, pendapatan dan kesejahteraan pelaku utama dan pelaku usaha serta meningkatkan kesadaran dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup melalui penyelenggaraan penyuluhan.*
- c. Meningkatkan pemanfaatan inovasi teknologi mendukung industrialisasi KP yang berdaya saing.*
- d. Menyelenggarakan fungsi kelembagaan dan menajerial SDM sesuai tata kelola pemerintahan yang baik.*

Visi, Misi, dan Tujuan Strategis BPPP Banyuwangi yang disampaikan di atas tertuang dalam rancangan Renstra BPPP Banyuwangi 2020-2024 yang belum ditetapkan seiring dengan penetapan Renstra KKP 2020-2024.

2.2 Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi

Sebagai bagian dari unit kerja di lingkup KKP, BPPP Banyuwangi harus mendukung sasaran strategis pada tingkat Kementerian. Sasaran Strategis (SS) lingkup BPPP Banyuwangi merupakan mendukung capaian kinerja level kementerian, (level 0). Selanjutnya, hal tersebut di-*cascading* ke level II di bawahnya dan di-*alignment* antar level III.

Secara keseluruhan, BPPP Banyuwangi mengemban Sasaran Strategis sebanyak 7 (tujuh) SS seperti disajikan pada tabel berikut :

Tabel 1. Sasaran Strategis BPPP Banyuwangi Tahun 2020-2024

SASARAN STRATEGIS	
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

2.3 Potensi dan Permasalahan

2.3.1 Potensi

Potensi Pengembangan sumberdaya manusia (SDM) dibidang kelautan dan perikanan memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian target kinerja pembangunan kelautan dan perikanan. Peran strategis tersebut dilaksanakan melalui kegiatan pendidikan, pelatihan dan penyuluhan serta riset kelautan dan perikanan yang diarahkan untuk mendorong dan mempercepat peningkatan kapasitas sumber daya manusia kelautan dan perikanan.

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi bertugas melaksanakan kegiatan Pelatihan Kelautan dan Perikanan pada wilayah kerjanya di 6 (enam) propinsi di wilayah kerja BPPP Banyuwangi yaitu propinsi Jawa Timur, Bali, Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kegiatan Pelatihan ditujukan kepada masyarakat kelautan dan perikanan yaitu pelaku utama dan pelaku usaha di sektor penangkapan, budidaya, pengolahan, pemasaran hasil perikanan, serta masyarakat kelautan dan perikanan lainnya.

BPPP Banyuwangi juga membawahi Penyuluh Perikanan pada 2 (dua) propinsi meliputi propinsi Jawa Timur dan Kalimantan Selatan. BPPP Banyuwangi bertugas menyiapkan bahan pengembangan penyuluhan dan pelaksanaan penyuluhan, serta penyusunan kebutuhan peningkatan kapasitas penyuluh PNS, swadaya dan swasta.

Keberhasilan pencapaian target ditentukan oleh sumberdaya yang dimiliki

oleh suatu organisasi. Berikut adalah potensi sumberdaya BPPP Banyuwangi dalam mencapai tujuan organisasi :

1. Memiliki SDM yang ahli, profesional dan berpengalaman dibidangnya serta bersertifikasi yang berkomitmen kuat untuk berkembang dan memajukan diklat;
2. Memiliki sarpras diklat yang memadai dan representatif;
3. Persetujuan dari Direktorat Jenderal Perikanan Tangkap untuk menyelenggarakan diklat kepelautan;
4. Memiliki Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) 1 bidang Kelautan dan Perikanan yang telah di lisensi oleh BNSP dan Tempat Uji Kompetensi / TUK LSP Kelautan dan Perikanan;
5. Sebagai tempat kedudukan PUKP-KAPIN XI Wilayah II
6. Tersedianya Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraan diklat sesuai manajemen mutu (ISO 9001 : 2015);
7. Komitmen yang kuat dari pimpinan dan jajaran staf untuk mencapai tujuan organisasi yaitu dengan adanya dukungan kebijakan dari Badan Riset dan Sumberdaya Manusia Kelautan dan Perikanan untuk mengembangkan mutu diklat;
8. Letak yang strategis berada pada jalur pantura Jawa dan berada pada lingkungan perikanan yang produktif;
9. Forum komunikasi dengan instansi terkait baik pemerintah maupun pihak swasta (bidang perikanan);
10. Kebutuhan tenaga kerja yang memenuhi Standar Kompetensi Kerja Nasional No. (SKKNI) sehingga masyarakat merasa perlu untuk mengikuti diklat;
11. Peningkatan kerjasama dengan instansi sejenis dan asosiasi industri/profesi;
12. Kesempatan meningkatkan pengetahuan dan keterampilan bagi tenaga kediklatan di dalam dan luar negeri;
13. Optimasi pemanfaatan fasilitas BPPP Banyuwangi yang tersedia;
14. Indonesia telah meratifikasi STCW-F pada tahun 2019;
15. Permen KP No. 33 Tahun 2021 tentang Log Book Penangkapan Ikan;
16. Pemantauan Di Atas Kapal Penangkap Ikan Dan Kapal Pengangkut Ikan;
17. Inspeksi, Pengujian dan Penandaan Pengembangan

2.3.2 Permasalahan

Sebagai Lembaga pelatihan dan penyuluhan yang terus berkembang menjadi pilihan utama *stakeholder* dalam rangka peningkatan kualitas sumberdaya manusia kelautan dan perikanan, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa hal yang penting untuk diperbaiki antara lain:

A. Aspek penyelenggaraan pelatihan KP antara lain:

1. Ketersediaan tenaga pelatih (instruktur dan widyaiswara) yang terus berkurang dikarenakan beberapa sudah memasuki usia purnatugas dan mutasi;
2. Sarana dan prasarana pelatihan belum sesuai dengan standar minimal pelatihan yang ditetapkan dan tidak lagi sesuai dengan perkembangan teknologi saat ini;
3. Kurikulum dan modul belum seluruhnya tersedia dan terstandar;
4. Kompetensi SDM BPPP Banyuwangi perlu ditingkatkan sesuai dengan kebutuhan;
5. Kurangnya penerapan regulasi terhadap persyaratan kompetensi pekerja/calon pekerja di bidang kelautan dan perikanan.

B. Aspek penyelenggaraan penyuluhan antara lain:

1. Kelembagaan penyuluhan perikanan belum berjalan dengan optimal;
2. Kualitas dan kuantitas penyebaran penyuluh perikanan masih belum memadai;
3. Sarpras penyuluhan belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan tugas penyuluh;
4. Pembiayaan penyelenggaraan penyuluhan masih terbatas.

2.4 STRATEGI PELAKSANAAN PROGRAM KERJA BPPP BANYUWANGI

Strategi pencapaian sasaran kegiatan pelatihan dan penyuluhan BPPP Banyuwangi adalah sebagai berikut:

2.4.1 Penguatan kelembagaan

Penguatan kelembagaan dilakukan dengan mensinergikan unit-unit kerja di BPPP Banyuwangi sehingga pelaksanaan kegiatan pelatihan dan penyuluhan KP dapat terlaksana dengan baik. Penempatan SDM yang tepat pada unit- unit kerja juga dapat berkontribusi dalam menghasilkan pelayanan yang baik kepada masyarakat dan stakeholder.

2.4.2 Ketenagaan

Tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam terlaksananya kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang baik. Untuk itu, peningkatan kapasitas dan kompetensi tenaga kepelatihan dan penyuluhan sangat penting untuk dilaksanakan. Peningkatan kualitas ketenagaan BPPP Banyuwangi dapat dilaksanakan dengan kegiatan pendidikan dan pelatihan, magang, dan kegiatan lainnya.

2.4.3 Monitoring dan Evaluasi Pelatihan dan Penyuluhan KP

Monitoring dan evaluasi pelatihan dan penyuluhan sangat penting dalam penyelenggaraan kegiatan pelatihan dan penyuluhan. Melalui monitoring dan evaluasi, kualitas penyelenggaraan kegiatan dapat dipantau dan diperbaiki jika terdapat kekurangan atau kesalahan dalam pelaksanaannya.

2.4.4 Kerjasama Pelatihan dan Penyuluhan KP

Selain memenuhi kebutuhan stakeholder, kerjasama juga dapat dijadikan sebagai cara untuk menambah daya jangkau kegiatan pelatihan dan penyuluhan yang terbatas oleh wilayah kerja dan anggaran.

2.4.5 Sarana dan Prasarana

Sarana dan prasarana sangat penting dalam penyelenggaraan suatu kegiatan. Sarana dan prasarana yang dimiliki BPPP Banyuwangi masih belum sesuai standar penyelenggaraan pelatihan. Untuk itu, peningkatan sarana dan prasarana mutlak diperlukan guna menghasilkan purnawidya yang berkualitas.

2.5 RENCANA KINERJA TAHUNAN

Sebagai wujud pelaksanaan Program Dukungan Manajemen Internal Lingkup KKP pada tahun 2023, BPPP Banyuwangi melaksanakan 2 (dua) kegiatan utama dengan alokasi anggaran yang mencapai Rp. 90,926,508,000. Kedua kegiatan tersebut adalah:

1. Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP dengan alokasi anggaran Rp.17.848.880.000
2. Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM dengan alokasi anggaran Rp. 73.077.628

Dukungan anggaran tersebut berupa kegiatan sebagai berikut :

Tabel 2. Dukungan anggaran BPPP Banyuwangi

NO	SASARAN KEGIATAN	ANGGARAN (Rp)
1	Inovasi yang diterapkan untuk Pelatihan Kelautan dan Perikanan (Kaji Terap)	120,000,000
2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Bersertifikat Kompetensi	54,000,000
3	Kelompok Pelaku Utama/Usaha Yang Mendapatkan Pendampingan Dari Penyuluhan KP	9,851,880,000
4	Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Mendapatkan Percontohan	500,000,000
5	Sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	830,000,000
6	Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	770,000,000
7	Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih	5,723,000,000
8	Layanan Umum	259,000,000
9	Layanan Perkantoran Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	72,662,162,000
10	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	48,400,000
11	Layanan Monitoring dan Evaluasi Internal	40,200,000
12	Layanan Pelaporan Kinerja Pelatihan dan Penyuluhan KP	27,700,000
13	Layanan Manajemen Keuangan	40,166,000
Total Anggaran BPPP Banyuwangi		90,926,508,000

2.6 PENETAPAN KINERJA TAHUN 2023

Sebagai penjabaran sasaran kinerja yang hendak dicapai dalam pembangunan kelautan dan perikanan, telah ditetapkan target tiap Indikator Kinerja pada masing-masing sasaran kinerja yang tertuang dalam Penetapan Kinerja berbentuk Perjanjian Kinerja (PK) tahun 2023. Sampai pada Triwulan I Tahun 2023 BPPP Banyuwangi belum mengalami perubahan Perjanjian Kinerja. Adapun Indikator Kinerja Utama bulan Januari tahun 2023, sebagaimana pada Tabel berikut :

Tabel 2. Penetapan Kinerja BPPP Banyuwangi TA 2023

NO	SASARAN KEGIATAN PUSLATLUH	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.990
		3	Nilai PNBP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	1,420
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Banyuwangi (orang)	36
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Banyuwangi (paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.100
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	270
		9	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	434
		10	Tenaga kerja yang terlibat di BPPP Banyuwangi (orang)	1.930
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan lptek KP di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	1
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%)	92
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	77
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Banyuwangi dibandingkan realisasi anggaran BPPP Banyuwangi TA. 2023 (%)	0,5
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	75
		20	Nilai PM SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	77
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	81

Penetapan kinerja BPPP Banyuwangi TA 2023 dalam bentuk Perjanjian Kinerja antara BPPP Banyuwangi dengan Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan tersaji dalam Lampiran 1.

2.7 Pengukuran Kinerja

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2023, dilakukan dengan membandingkan antara target (rencana) dengan realisasi pada masing-masing indikator kinerja, akan diperoleh indeks capaian IKU. Capaian tersebut kemudian dilakukan penginputan data melalui aplikasi kinerjaku.kkp.go.id.

2.7.1 Rumus Pengukuran

Perhitungan indeks capaian IKU perlu memperhitungkan jenis polarisasi IKU yang berlaku yaitu *maximize*, *minimize*, dan *stabilize*. Ketentuan penetapan indeks capaian IKU adalah:

- 1) Angka maksimum adalah 120;
- 2) Angka minimum adalah 0;
- 3) Formulasi penghitungan indeks capaian IKU untuk setiap jenis polarisasi adalah berbeda;
- 4) Adapun status indeks capaian IKU seperti tabel

sebagai berikut :

Warna	Keterangan
Istimewa	nilai 110 - 120
Baik	nilai 90 - <110
Cukup	nilai 70 - <90
Kurang	nilai 50 - <70
Sangat Kurang	untuk nilai <50
Belum ada penilaian	

Tabel 4. Status Indeks Capaian IKU

Pengukuran kinerja dilakukan dengan mengacu kepada Manual IKU pada masing-masing Indikator yang ada dalam dokumen *Balanced Score Card* (BSC).

2.8 Metode Pengukuran Kinerja

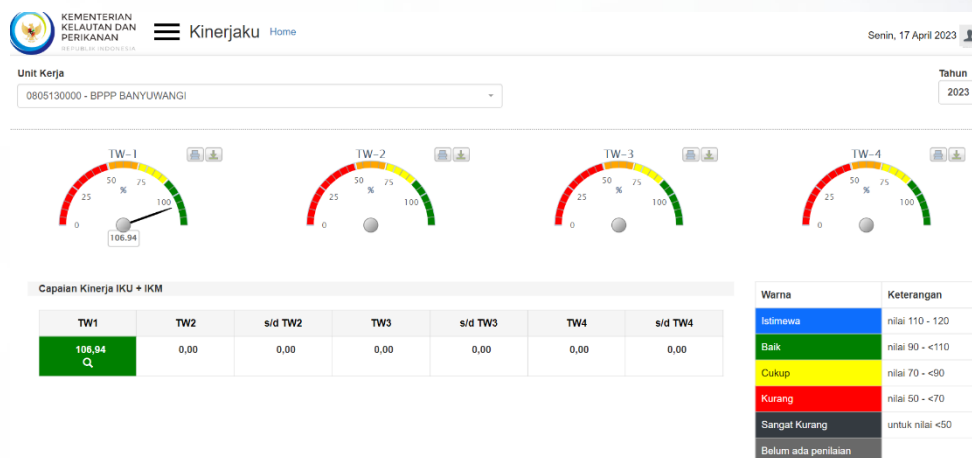
Metode pengukuran kinerja lingkup BPPP Banyuwangi dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan sekali (triwulanan), yaitu pada bulan Maret (B03), Juni (B06), September (B09) dan Desember (B12), serta tahunan pada akhir tahun anggaran yang bertanggungjawab dalam pengukuran adalah Tim Pengelola Kinerja Instansi Pemerintah yang ditetapkan melalui Surat Keputusan Kepala BPPP Banyuwangi Nomor: KEP. 96/BRSDM-BPPP.BYW/II/2023 tentang Tim Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi Tahun 2023. Keanggotaan tim terdiri dari pejabat dan staf yang mewakili semua kelompok di BPPP Banyuwangi. Berdasarkan laporan sub koordinator penanggung jawab kegiatan, Kepala Balai c.q. Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi merangkum seluruh hasil yang dicapai dan melakukan evaluasi untuk mengendalikan pencapaian pelaksanaan program/kegiatan secara keseluruhan.

BAB 3 AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Prestasi Indikator Kinerja Utama Triwulan I Tahun 2023

Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi Triwulan I Tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (key performance indicator, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis balanced scorecard dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>.

Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian kinerja BPPP Banyuwangi di tingkat korporat Triwulan I Tahun 2023 sebesar 106,94% yang berasal dari capaian kinerja masing-masing perspektif sebagai berikut :



Gambar3. Capaian Kinerja Tahun2023 BPPP Banyuwangi

web.kinerjaku.kkp.go.id

3.2 Evaluasi dan Analisis Kinerja

Pelaksanaan evaluasi dan analisis kinerja dilakukan melalui pengukuran kinerja dengan menggunakan formulir pengukuran kinerja sesuai Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan program sesuai dengan sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi BPPP Banyuwangi. Pengukuran kinerja dimaksud merupakan hasil dari suatu penilaian yang didasarkan pada Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah diidentifikasi agar sasaran-sasaran strategis dan tujuan strategis sebagaimana telah ditetapkan dalam Peta Strategi BPPP Banyuwangi yang menjadi kontrak kinerja pada triwulan I Tahun 2023 dapat tercapai.

Tabel 4. Capaian Kinerja Kegiatan BPPP Tahun Triwulan I 2023

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN	TARGET 1 THN	TARGET TW 1	CAPAIAN TW 1	
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan KP Kegiatan						
SK 01	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	IKSK 01.01	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%)	70	0	0-
		IKSK 01.02	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.990	1.590	2.074
		IKSK 01.03	Nilai PNBP BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	1,420	0,11	0,12
SK 0.2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	IKSK 02.01	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang)	90	20	20
SK 03	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	IKSK 03.01	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Banyuwangi (orang)	36	0	0
		IKSK 03.02	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis kaji Widya di BPPP Banyuwangi (paket)	2	0	0
SK 04	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	IKSK 04.01	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Banyuwangi (kelompok)	6.100	1.300	1.507

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 1 THN	TARGET TW 1	CAPAIAN TW 1
		IKSK 04.02	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	270	0	0
		IKSK 04.03	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	434	78	78
		IKSK 04.04	Tenaga kerja yang terlibat di BPPP Banyuwangi (orang)	1,930	0	0
SK 05	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	IKSK 05.01	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas)	1	0	0
SK 06	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	IKSK 06.01	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	1	0	0
		IKSK 06.02	Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	1	0	0

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM

		IKSK 07.01	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	30	35,71
		IKSK 07.02	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	0	0
SK 07	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	IKSK 07.03	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%)	92	92	100
		IKSK 07.04	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	77	0	0

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA KEGIATAN		TARGET 1 THN	TARGET TW 1	CAPAIAN TW 1
		IKSK 07.05	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Banyuwangi dibandingkan realisasi anggaran BPPP Banyuwangi TA. 2021 (%)	0,5	0	0
		IKSK 07.06	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	75	75	75
		IKSK 07.07	Nilai PM SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	77	0	0
		IKSK 07.08	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai)	89	0	0
		IKSK 07.09	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	86	0	0

Salah satu misi BRSDMKP dalam mendukung visi Kementerian adalah peningkatan kualitas SDM KP melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dalam penerapan hasil inovasi riset Kelautan dan Perikanan. Dengan fokus kesejahteraan masyarakat dengan didukung oleh pembangunan kelautan dan perikanan yang berdaya saing dan berkelanjutan maka sasaran strategis tersebut menjadi tujuan utama pencapaian Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan (BPPP) Banyuwangi dengan didukung oleh 2 (dua) indikator kinerja utama atas sasaran strategis tersebut. BPPP Banyuwangi sebagai bagian dari pembangunan kelautan dan perikanan melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan bertanggung jawab sesuai tugas dan fungsi atas pencapaian sasaran strategis tersebut dengan dukungan alokasi anggaran pada setiap IKU sasaran strategis tersebut melalui peningkatan kompetensi dan pendampingan dengan sentuhan kegiatan penyuluhan KP.

Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Sasaran Kegiatan 1

Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya pelatihan SDM kelautan dan perikanan terdapat 3 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 1 : Persentase Lulusan Pelatihan Yang Terserap Di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%), IKU 2 : Masyarakat Kelautan dan Perikanan Yang Dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang) dan IKU 3 : Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)

Indikator Kinerja 1

Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi (%)

Merupakan indikator yang menggambarkan Jumlah lulusan pelatihan yang menunjukkan Jumlah lulusan pelatihan pelaku utama/usaha yang menerapkan hasil pelatihan di DUDI dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun. Realisasi capaian IKU Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar

65%, atau melebihi dari target sebesar 65%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 60 % mengalami peningkatan sebesar 5%, dan dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 60%, tidak mengalami peningkatan/penurunan.

Realisasi capaian IKU 2022 sebesar 65%, dibandingkan dengan target renstra tahun 2022 sebesar 65% tidak mengalami penurunan maupun kenaikan dan apabila dibandingkan dengan target tahun 2024 sebesar 75%, memperlihatkan capaian -10% yang menunjukkan perlu dilakukan berbagai upaya untuk dapat mencapai target IKU pada tahun 2024.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama/pelaku usaha KP yang telah dilatih dan menerapkan hasil pelatihannya yang dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih. Sampai akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan identifikasi lulusan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri sehingga penilaiannya masih 0.

Tabel 5. Capaian Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi

SK-1		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan							
IKU-1		Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
60	65	70	0	0	5	70	0	75	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 6. Perbandingan realisasi kinerja Persentase lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Pada triwulan I Tahun 2023, belum dilakukan pengukuran capaian sehingga belum dapat diperoleh presentasi perbandingan capaian dengan balai lingkup BRSDM KP.

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah terdapatnya hasil evaluasi pasca pelatihan yang dilaksanakan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus produksi setelah dilatih, sebagai bahan capaian lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri BPPP Banyuwangi. Selain itu para lulusan pelatihan dilakukan pendampingan oleh penyuluh secara berkelanjutan untuk dapat menerapkan hasil pelatihan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung dengan mengoptimalkan peran penyuluh dilapangan.
2. Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Dilaksanakan kegiatan evaluasi pasca pelatihan untuk mengidentifikasi purnawidya yang telah terserap di dunia usaha/industri yang mudah dipahami oleh purnawidya.
2. Melakukan analisis terhadap hasil pelaksanaan pelatihan menggunakan instrumen evaluasi pasca pelatihan sebagai bahan masukan untuk perbaikan penyelenggaraan pelatihan berikutnya.
3. Pelaksanaan pendampingan oleh Penyuluh perikanan dalam mengidentifikasi dan melakukan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan dan pendampingan penerapan hasil pelatihan.

Indikator Kinerja 2

Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah masyarakat kelautan dan perikanan yang telah dilatih dibidang kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Realisasi IKU pada tahun 2015 sampai dengan 2018 sebanyak 15.834 orang, dengan rincian sebagai berikut : Tahun 2015 sebanyak 5.685 orang, pada tahun 2016 sebanyak 4.929 orang, pada tahun 2017 sebanyak 1.590 orang, pada tahun 2018 sebanyak 3.630 orang, pada tahun 2019 sebanyak 4.121 orang, pada tahun 2020 sebanyak 3.329 orang dan pada tahun 2021 sebanyak 8.780 orang dan tahun 2022 sebanyak 7.450 orang. Kegiatan pelatihan bersifat daring dan luring, metode daring ini juga dibantu oleh para penyuluh dilapangan untuk mengawal dan membantu para peserta pelatihan dalam melakukan proses pelatihan.

Realisasi capaian IKU Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 2.074 orang atau melebihi dari target triwulan I tahun 2023 sebesar 1.590 orang.

Kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian IKU ini adalah tersedianya pedoman penyelenggaraan pelatihan, kurikulum dan modul yang sesuai dengan kebutuhan kompetensi masyarakat KP, instruktur yang memiliki kompetensi sesuai dengan materi yang dilatihkan, dan sarana prasarana yang terstandar, serta tersedianya database penyelenggaraan pelatihan melalui SIMLAT KP sebagai alat pengendalian dalam pelaksanaan pelatihan oleh BPPP Banyuwangi.

Tabel 7. Capaian Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi

SK-1		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan							
IKU-2		Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
8.780	7.450	5.990	2.074	34,62	0	5.990	0	8.200	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 8. Perbandingan realisasi Masyarakat kelautan dan perikanan yang dilatih dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	16,07	34,62	46.42
2	BPPP Tegal	13,83	34,62	39.95
3	BPPP Ambon	12,38	34,62	35.76
4	BPPP Bitung	15,10	34,62	43.62

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya penyuluh diwilayah kerja BPPP Banyuwangi yang siap melakukan identifikasi calon peserta pelatihan sesuai dengan bidang pelatihan teknis yang akan dilaksanakan dan membantu melakukan koordinasi secara intensif dengan Dinas Perikanan setempat sehingga kegiatan pelatihan dapat dilaksanakan dengan baik.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya koordinasi persiapan pelatihan
2. Persiapan kegiatan pelatihan yang dilakukan secara intensif oleh panitia pelatihan dan penyuluh pendamping sehingga proses kegiatan pelatihan dapat berjalan dengan lancar sampai akhir kegiatan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Membuat kalender pelatihan KP sesuai arahan kebijakan pimpinan, kebutuhan daerah dan potensi daerah
2. Bekerjasama dengan penyuluh perikanan yang ditugaskan sebagai pendamping rencana kegiatan pelatihan yang akan diselenggarakan baik secara *zoom meeting* maupun komunikasi secara intensif melalui telepon.

Indikator Kinerja 3

Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar).

Nilai Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan adalah pungutan yang dibayar oleh orang pribadi atau badan dengan memperoleh manfaat langsung maupun tidak langsung atas layanan atau pemanfaatan sumber daya dan hak yang diperoleh negara berdasarkan peraturan perundang-undangan, yang menjadi penerimaan Pemerintah Pusat di luar penerimaan perpajakan dan hibah dan dikelola dalam mekanisme anggaran pendapatan dan belanja negara dari sektor kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

Cara perhitungan IKU tersebut dengan menjumlahkan seluruh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan yang tercatat pada aplikasi OM SPAM BPPP Banyuwangi.

Realisasi capaian IKU Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi pada triwulan I tahun 2023 sebesar 0,12 milyar, pada tahun 2020 capaian PNBP BPPP Banyuwangi sebesar 0,10 milyar mengalami kenaikan sebesar 0,02 milyar.

Sampai akhir triwulan I Tahun 2023 BPPP Banyuwangi telah memperoleh Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) Sektor Kelautan dan Perikanan sebesar Rp. 0,12 Miliar.

Tabel 9. Capaian Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi

SK-1		Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan							
IKU-3		Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
-	0,54	1,420	0,12	8,45	15,64	1,420	8,45	0,405	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 10. Perbandingan realisasi Nilai PNBP Satker dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	187,17	8,45	2215.03
2	BPPP Tegal	13,63	8,45	161.30
3	BPPP Ambon	0,21	8,45	2.49
4	BPPP Bitung	58,51	8,45	692.43

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah promosi baik secara langsung maupun pada media sosial BPPP Banyuwangi kegiatan strategis sebagai sumber penghasil PNBP serta membangun jejaring kerjasama dengan stakeholder dalam segi peningkatan kapasitas SDM KP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Peningkatan PNBP dari sektor pelatihan BST dan penggunaan sarana dan prasarana BPPP Banyuwangi.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi NTT, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pelatihan *Basic Safety Training* (BST) yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama pelatihan yang menggunakan sarana dan prasarana BPPP Banyuwangi yang sangat memadai.
3. Kegiatan sertifikasi kelautan dan perikanan melalui LSP 1 Banyuwangi

Sasaran Kegiatan 2

Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan terdapat 1 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 4 : Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi BPPP Banyuwangi (Orang)

Indikator Kinerja 4

Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah SDM KP yang mengikuti uji kompetensi sesuai dengan persyaratan uji kompetensi. Peserta yang mendapatkan sertifikat kompetensi adalah yang sudah dinyatakan lulus sesuai dengan persyaratan dan ujian. Sertifikat dikeluarkan oleh LSP/BNSP dan atau Lembaga Sertifikasi lainnya.

Cara perhitungannya dengan menghitung jumlah SDM yang mengikuti sertifikasi kompetensi di wilayah kerja BPPP Banyuwangi. Realisasi capaian IKU Jumlah SDM KP yang Bersertifikat Kompetensi pada triwulan I tahun 2023 sebanyak 20 orang.

Tabel 11. Capaian Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)

SK-2		Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan							
IKU-3		Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
90	90	90	20	22,22	-	90	22,22	90	100

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah jumlah asesor kompetensi BPPP Banyuwangi yang masih memenuhi standar kegiatan sertifikasi kompetensi baik bidang budidaya perikanan, pengolahan hasil perikanan, permesinan kapal dan penangkapan ikan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kelengkapan sarana dan prasarana sertifikasi kompetensi yang tersedia di BPPP Banyuwangi.
2. Promosi dengan menggunakan media sosial lebih meningkatkan ruang lingkup promosi bahkan sampai luar Provinsi Maluku, sehingga dapat mengefisiensi anggaran promosi dan petugas yang melakukan promosi tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan sertifikasi kompetensi yang dilaksanakan sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.
2. Kegiatan kerjasama sertifikasi kompetensi dengan sekolah-sekolah yang membutuhkan sertifikasi kompetensi bagi anak didiknya.

Sasaran Kegiatan 3

Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya kaji terap pelatihan KP terdapat 2 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 5 : Lulusan Pelatihan Yang Membentuk Start Up (Usaha Rintisan) di BPPP Banyuwangi (Orang) dan IKU 6 : Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Banyuwangi (Orang).

Indikator Kinerja 5

Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) di BPPP Banyuwangi (orang).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dengan memanfaatkan teknologi digital dalam mengembangkan usahanya (pengembangan ekonomi digital) dan atau membuat jejaring pasar dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya yang

dihitung melalui evaluasi pasca pelatihan sekurang-kurangnya setelah 1 siklus periode setelah dilatih. Sampai triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan identifikasi pelaku utama lulusan pelatihan yang melakukan wirausaha dan memanfaatkan teknologi digital dan atau jejaring pasar dalam pengembangan usahanya sehingga nilai capaiannya masih 0

Tabel 13. Capaian Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) di BPPP Banyuwangi

SK-3		Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP							
IKU-5		Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (Usaha Rintisan) di BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
18	32	32	0	0	0	32	0	50	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 14. Perbandingan realisasi Lulusan pelatihan yang membentuk *start up* (Usaha Rintisan) dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kemudahan pengisian instrumen evaluasi pasca pelatihan oleh purnawidya yang nantinya akan menjadi output yang membentuk *start up* (usaha rintisan).

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas evaluasi pasca pelatihan secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Banyuwangi.

2. Kemudahan petugas evaluasi pasca pelatihan dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirm sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah menyiapkan instrumen Evaluasi pasca pelatihan untuk identifikasi purnawidya yang membentuk *start up* (usaha rintisan)
2. Bekerjasama dengan Penyuluh pendamping kegiatan pelatihan yang telah diselenggarakan dalam identifikasi dan pengisian instrumen Evaluasi pasca pelatihan.

Indikator Kinerja 6

Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Banyuwangi (Paket).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah Paket Kaji Widya yang dibuat oleh Instruktur/ Widyaiswara di BPPP yang dapat dimanfaatkan sebagai bahan materi pelatihan kelautan dan perikanan dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang ada ditahun 2021. Cara perhitungan ini IKU ini dengan cara mengakumulasi jumlah paket kajiwidya yang dihasilkan oleh BPPP Banyuwangi. Sampai akhir triwulan I tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan proses kegiatan teknis berbasis kaji widya di BPPP Banyuwangi sehingga nilai capaiannya masih 0

Tabel 15. Capaian Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya di BPPP Banyuwangi

SK-3		Terselenggaranya kaji Terap Pelatihan KP							
IKU-6		Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
4	0	2	0	0	0	2	0	2	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 16. Perbandingan realisasi Tersedianya Materi Pelatihan Berbasis Kaji Widya dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kebutuhan kompetensi tenaga fungsional BPPP Banyuwangi baik widyaiswara dan instruktur sehingga dengan adanya kegiatan kaji widya dapat meningkatkan kompetensi dan perolehan angka kredit bagi fungsional yang melakukan kegiatan tersebut.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran kaji widya telah dilaksanakan sehingga kebutuhan alat dan bahan dapat dipenuhi secara optimal.
2. Pelatih telah mengetahui progres kegiatan kaji terap telah sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Telah memiliki juknis pelaksanaan kegiatan kaji widya sehingga memudahkan tenaga fungsional dalam penyusunan laporan kegiatan.
2. Telah dibuat jadwal Pelaksanaan kegiatan kaji widya yang telah disahkan oleh Kepala BPPP Banyuwangi.

Sasaran Kegiatan 4

Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Untuk mencapai sasaran kegiatan terselenggaranya penyuluhan kelautan dan perikanan terdapat 4 indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 7 : Jumlah Kelompok Pelaku Utama/Pelaku Usaha Yang Disuluh Di Satminkal BPPP Banyuwangi, IKU 8 : Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok), IKU 9 : Kelompok Kelautan dan Perikanan Yang Dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi dan IKU 10 : Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Banyuwangi (orang)

Indikator Kinerja 7

Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/ pelaku usaha yang disuluh oleh Penyuluh Perikanan. Kegiatan Penyuluhan yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan diantaranya seperti: Pendampingan kelompok, penilaian kelas kelompok, pendampingan akses modal, pendampingan akses pasar, pendampingan akses informasi/teknologi, pembinaan UMKM dan Koperasi, pendampingan kelompok penerima bantuan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Banyuwangi pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 25.358 orang, pada tahun 2019 sebanyak 34.500 orang, pada tahun 2020 sebanyak 2.686 kelompok dan pada tahun 2021 sebanyak 2.641 kelompok, sampai akhir triwulan I tahun 2023 Penyuluh Satminkal BPPP Banyuwangi sudah melakukan penyuluhan sebanyak 1.507 kelompok dari target triwulan I Tahun 2023 kelompok yang disuluh sebanyak 1.300 kelompok sehingga persentase secara didapat sebesar 105%.

Tabel 17. Capaian Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi

SK-4		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU-7		Jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
2.641	1.595	1.300	1.507	105	0	6.244	0	7.200	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 18. Perbandingan realisasi jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha yang disuluh dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	24,70	105	61,82
2	BPPP Tegal	21,11	105	72,36
3	BPPP Ambon	24,70	105	61,82
4	BPPP Bitung	4,35	105	351,03

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kegiatan monitoring capaian IKU yang dilaksanakan oleh Satminkal Penyuluhan dengan instrumen monitoring yang dimulai dari Perjanjian Kinerja antara Kepala Satminkal dengan Penyuluh Perikanan, pelaporan online penyuluh, SKP yang disertai dengan dokumen pendukung capaian SKP, serta evaluasi kinerja penyelenggaraan penyuluhan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut :

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.

2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki kegiatan strategis, yaitu masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.

Indikator Kinerja 8

Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan jumlah kelompok pelaku utama/pelaku usaha KP yang meningkat kelas kelompoknya sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Banyuwangi pada tahun 2017, akan tetapi pola perhitungannya adalah perhitungan secara individu atau perorangan dengan realisasi pada tahun 2018 sebanyak 450 kelompok, tahun 2019 sebanyak 503 kelompok, tahun 2020 sebanyak 237 Kelompok, tahun 2021 sebanyak 312 kelompok dan tahun 2022 sebanyak 6.244 kelompok.

Sampai akhir triwulan I tahun 2023, Penyuluh Satminkal BPPP Banyuwangi masih melakukan persiapan peningkatan kelas kelompok pelaku utama/pelaku usaha di Satminkal BPPP Banyuwangi sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 19. Capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Banyuwangi

SK-4		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU-8		Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di satminkal BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
312	304	312	0	0	0	312	0	100	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 20. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan baik secara daring maupun luring oleh Kepala BPPP Banyuwangi dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang terascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Banyuwangi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Penyuluh melakukan pendampingan kelompok dan telah mengidentifikasi dan melakukan peningkatan kelas kelompok terhadap calon kelompok dengan kriteria-kriteria yang telah ditentukan melalui pendampingan yang dilakukan.
3. Surat Keputusan dan verifikasi oleh Dinas Kelautan dan Perikanan dan Pejabat Pemerintah Daerah telah ditetapkan.

Indikator Kinerja 9

Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok).

Merupakan indikator yang menunjukkan kelompok pelaku utama Kelautan dan Perikanan yang ditumbuhkan dan dibentuk dengan kriteria pembentukan kelompok sesuai dengan Kepmen KP No. 14 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penumbuhan dan Pengembangan Kelembagaan Pelaku Utama Perikanan dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan.

IKU ini sudah ada sejak tahun 2018 pada saat penyuluh perikanan di daerah bergabung dengan pusat sehingga terbentuk Satuan Administrasi Pangkal di BPPP Banyuwangi pada tahun 2017, namun merupakan target antara Seksi Penyuluhan dengan penyuluh Satminkal dengan target sebanyak 70 % penyuluh yang melakukan penilaian kelas kelompok. Pada tahun 2019 nilai pencapaian IKU ini sudah mencapai 1.462 unit, tahun 2020 nilai pencapaiannya sebanyak 136 kelompok, tahun 2021 nilai pencapaiannya sebanyak 130 kelompok dan tahun 2022 nilai pencapaiannya sebanyak 232 kelompok, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah kelompok Pelaku utama yang dibentuk yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan yang dibuktikan dengan Berita Acara Penumbuhan kelompok yang termuat di dalam laporan kinerja penyuluh perikanan.

Sampai akhir triwulan I tahun 2023, Penyuluh Satminkal BPPP Banyuwangi telah melakukan pendataan calon kelompok yang ditumbuhkan kelompoknya sebanyak 20 kelompok dari target triwulan I tahun 2023 sebanyak 10 kelompok sehingga persentase didapat sebesar 120%.

Pembentukan kelompok ditandai dengan penerbitan sertifikat pengukuhan yang ditandatangani oleh pejabat wilayah setempat (lurah, kepala desa atau sejenisnya) dan dilaporkan kepada Dinas yang menangani penyuluhan perikanan kabupaten/kota.

Tabel 21. Capaian Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi

SK-4		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU-9		Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
130	232	270	20	7,40	0	270	20	500	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 22. Perbandingan realisasi Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	25,35	9,30	36,68
2	BPPP Tegal	7,26	9,30	128,09
3	BPPP Banyuwangi	17,97	9,30	51,75
4	BPPP Bitung	1,99	9,30	467,33

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah peningkatan kinerja penyuluhan dilakukan baik secara daring maupun luring oleh Kepala BPPP Banyuwangi dalam rangka merealisasikan indikator kinerja individu yang terascading langsung kepada indikator kinerja BPPP Banyuwangi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Penyerapan anggaran tunjangan kinerja penyuluh PNS dan BOP PNS serta PPB dapat terealisasi secara optimal dengan disertai capaian kinerja yang telah ditetapkan kepada masing-masing penyuluh.
2. Penyuluh telah diberikan target indikator kinerja individu yang harus dicapai sampai dengan akhir tahun sehingga diharapkan seluruh target kinerja individu penyuluh yang terascading langsung ke indikator kinerja balai dapat terealisasi dengan baik.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Masing-masing penyuluh tetap melaksanakan pendampingan terhadap kelompok perikanan dan kelautan yang disuluh sesuai dengan wilayah binaannya.
2. Antusias masyarakat pelaku usaha KP untuk menjadi kelompok perikanan pada tahun 2022.

Indikator Kinerja 10

Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Banyuwangi (Orang)

Tenaga kerja yang terlibat dalam sektor kelautan dan perikanan merupakan setiap orang yang melakukan pekerjaan yang menghasilkan barang/jasa maupun yang menerima manfaat/operasionalisasi dalam kegiatan prioritas fisik ataupun non fisik di sektor kelautan dan perikanan baik perikanan tangkap, perikanan budidaya, pengolahan, pemasaran produk perikanan, pengelolaan ruang laut, penyuluhan pelatihan serta karantina ikan. Tenaga kerja yang terlibat langsung di lingkup BRSDM diantaranya : Penyuluh Perikanan Bantu, Penyuluh Swadaya, UMKM yang disuluh, dan P2MKP dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Sampai akhir triwulan I tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan identifikasi tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Banyuwangi sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 23. Capaian Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Banyuwangi

SK-4		Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
IKU-10		Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
0	2.231	1.930	0	0	0	1.930	0	2.231	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 24. Perbandingan realisasi Tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah kemudahan pengisian instrumen tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Banyuwangi baik yang dilakukan oleh Penyuluh Perikanan maupun pengelola Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Efisiensi biaya perjalanan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Banyuwangi secara langsung sehingga dapat dialihkan untuk kegiatan strategis yang lain yang mendukung peningkatan kinerja BPPP Banyuwangi.
2. Kemudahan petugas identifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Banyuwangi dalam merekap hasil evaluasi pasca pelatihan dikarenakan hasil yang dikirim sudah dalam bentuk softcopy sesuai dengan format kuisisioner yang ditetapkan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Sosialisasi peranan penyuluh perikanan baik PNS, PPB dan Swadaya dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Banyuwangi
2. Sosialisasi peranan Pusat Pelatihan Mandiri Kelautan dan Perikanan dalam mengidentifikasi tenaga kerja yang terlibat dengan BPPP Banyuwangi.

Sasaran Kegiatan 5

Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP terdapat 1 (satu) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 11 : Desa/kawasan Mitra Yang Menerapkan Iptek di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas)

Indikator Kinerja 11

Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas).

Desa/Kawasan mitra merupakan konsep pembangunan desa perikanan yang berbasis penerapan teknologi informasi komunikasi dan manajemen tepat guna berkelanjutan untuk

meningkatkan ekonomi masyarakat desa yang diwujudkan dalam kegiatan prioritas BRSDM yaitu Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village (SFV)

Sesuai dengan Keputusan Ka BRSDM No.38/2022, dengan dikembangkannya Desa Perikanan cerdas/Smart Fisheries village SFV akan terbentuk desa perikanan unggulan yang produktif yang mampu menerapkan teknologi dan informasi, mandiri dan memperhatikan prinsip berkelanjutan

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2020, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung jumlah Desa yang memanfaatkan teknologi dan inovasi kelautan dan perikanan tahun 2022 yang dibuktikan dengan MOU/PKS antara Kepala Badan RSDMKP dengan Bupati/Walikota. Sampai akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan persiapan pelaksanaan kegiatan desa inovasi sehingga pencapaiannya masih 0

Tabel 25. Capaian Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Banyuwangi

SK-5		Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP							
IKU-11		Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
1	1	1	0	0	0	1	0	5	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 26. Perbandingan realisasi Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Program Desa mitra/Kawasan mitra Kelautan dan Perikanan bertujuan:

1. Mendayagunakan iptek untuk meningkatkan daya saing dan kesejahteraan masyarakat (desa);
2. Membangun hubungan interaksi antara dunia iptek (*research and development*) dengan dunia usaha di masyarakat (desa);
3. Mendorong masyarakat (desa) untuk mengikuti perkembangan iptek agar usaha masyarakat desa berkembang dan berkelanjutan;
4. Menciptakan produk unggulan spesifik desa (daerah) yang berkualitas; dan
5. Meningkatkan daya saing usaha masyarakat (desa) melalui pemanfaatan iptek kelautan dan perikanan.

Tahapan kegiatan untuk mewujudkan desa inovasi/desa mitra ini meliputi koordinasi dan survei, identifikasi dan penetapan teknologi, perakitan, introduksi teknologi, alih teknologi, pendampingan proses alih teknologi, serta monitoring dan evaluasi.

Dalam pelaksanaan kegiatan, Desa mitra/kawasan mitra yang ditetapkan diberikan teknologi dan inovasi yang dapat dimanfaatkan untuk memperbaiki kehidupan masyarakat kelautan dan perikanan. Pemanfaatan tersebut dapat terlihat dari terdiseminasikannya teknologi dan atau kebijakan inovatif yang didasarkan atas hasil-hasil riset Perikanan kepada stakeholder di desa. Selain itu, dapat pula memberikan masukan penetapan kebijakan riset dari umpan balik stakeholders sehingga dihasilkan teknologi dan atau kebijakan yang bersifat inovatif dan tepat guna.

Sasaran Kegiatan 6

Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP

Untuk mencapai Sasaran Kegiatan Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP terdapat 2 (dua) Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 12 : Jumlah Sarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi (Unit) dan IKU 13 : Jumlah Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi (Unit).

Indikator Kinerja 12

Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Banyuwangi dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Sarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik /belanja modal. Sampai akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan tahap pengadaan sarana sebagai penunjang pelatihan dan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 27. Capaian Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi

SK-6		Tersedianya Saran dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP							
IKU-12		Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
1	2	1	0	0	0	1	0	1	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 28. Perbandingan realisasi Jumlah sarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah seluruh Proses pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Banyuwangi membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan sarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Indikator Kinerja 13

Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi (unit).

Merupakan indikator Peningkatan kapasitas prasarana yang berbentuk pengadaan fisik dan non fisik/belanja modal yang dilaksanakan oleh satuan kerja lingkup BPPP Banyuwangi dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

IKU ini merupakan IKU baru yang baru ada pada tahun 2021, penghitungan dilakukan dengan cara menghitung Jumlah Prasarana yang berbentuk pembangunan dan renovasi bangunan/belanja modal. Sampai akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih melakukan tahap pembangunan prasarana sebagai penunjang pelatihan dan penyuluhan KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 29. Capaian Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi

SK-6		Tersedianya Saran dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP							
IKU-13		Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar di BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
1	1	1	0	0	0	1	0	1	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 30. Perbandingan realisasi Jumlah prasarana pelatihan dan penyuluhan KP Yang Terstandar dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah seluruh Proses pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan di LPSE.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan telah dilaksanakan dengan baik dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan dengan harga penawaran lebih rendah dengan kualitas yang sesuai dengan kebutuhan.
2. Pejabat pengadaan barang dan jasa telah memiliki sertifikat kompetensi sehingga proses pengadaan barang dan jasa dapat dilaksanakan sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan dilaksanakan dengan menunjuk pihak penyedia yang memiliki kualifikasi yang telah ditetapkan
2. BPPP Banyuwangi membuat komitmen terkait penyelesaian Kegiatan pengadaan/pekerjaan prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan harus sesuai dengan kontrak yang telah disepakati oleh kedua belah pihak.

Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM

Sasaran Kegiatan 1

Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi

Untuk mencapai Sasaran kegiatan Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi terdapat 9 Indikator kinerja yang ditetapkan yaitu IKU 14 : Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi, IKU 15 : Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi, IKU 16 : Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi, IKU 17 : Indeks profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi, IKU 18 : Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Banyuwangi

Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi TA. 2022, IKU 19 : Rekomendasi Hasil Pengawasan Yang Dimanfaatkan Untuk Perbaikan Kinerja BPPP Banyuwangi, IKU 20 : Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Banyuwangi, IKU 21 : Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Banyuwangi dan IKU 22 : Nilai kinerja anggaran BPPP Banyuwangi.

Indikator Kinerja 14

Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%).

Merupakan indikator yang menunjukkan pemenuhan layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi berupa tersedianya laporan-laporan kegiatan BPPP Banyuwangi.

Perhitungan Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi ini dihitung berdasarkan pemenuhan laporan-laporan kegiatan BPPP Banyuwangi berupa laporan tahunan, laporan pelaksanaan program dan kegiatan dan laporan keuangan.

Perhitungan ini dilakukan setiap triwulan tahun 2023, sesuai dengan data dukung yang telah dikerjakan sehingga nilai pencapaian masih 35,71 %. Adapun dokumen yang harus disediakan pada akhir triwulan I tahun 2023 terdiri dari pemenuhan 26 dokumen yaitu :

Tabel 31. Pemenuhan dokumen Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi

No	Nama Dokumen	Target	Realisasi	% Realisasi	Keterangan
1	Laporan Realisasi Keuangan	12	3	25	Tata Usaha
2	Laporan PIPK	1	0	0	Tata Usaha
3	Laporan Weekly Report	12	3	25	Tata Usaha
4	Laporan Keuangan	2	0	0	Tata Usaha
5	Laporan BMN	2	0	0	Tata Usaha
6	Laporan Survey Kepuasan Masyarakat	4	1	25	Pelatihan
7	Laporan Pelatihan	4	1	25	Pelatihan
8	Laporan Penyuluhan	4	1	25	Peyuluhan
9	Laporan Peningkatan Kelas	4	1	25	Peyuluhan
10	Laporan Penumbuhan Kelas kelompok	4	1	25	Peyuluhan
11	Laporan Simlat	4	1	25	Program & Monev
12	Kertas kerja Perencanaan	2	2	100	Program & Monev
13	Laporan Kinerja	4	1	100	Program & Monev
14	Perjanjian Kinerja	1	1	25	Program & Monev

15	Rencana Kerja Tahunan	1	1	100	Program & Monev
16	Laporan Monev DUDI	1	0	100	Program & Monev
17	Laporan Start Up	1	0	0	Program & Monev
18	Rencana Aksi	1	1	0	Program & Monev
19	Evaluasi Rencana Aksi	1	1	100	Program & Monev
20	Laporan Tahunan	1	0	100	Program & Monev
21	Laporan program/kegiatan	1	0	0	Program & Monev
22	Matrik Manajemen Resiko	1	1	0	Program & Monev
23	Laporan Keterbukaan Informasi Publik	2	0	100	Program & Monev
24	Laporan sertifikasi kompetensi	4	1	25	Program & Monev
25	Laporan Realisasi Kerjasama (MoU)	4	1	25	Program & Monev
26	Printscreen aplikasi Triwulan				Program & Monev
	a. SMART DJA	4	1	25	
	b. Bappenas E Monev	4	1	25	
	c. OMSPAN	4	1	25	
	d. Kinerjaku	4	1	25	
TOTAL		94	33	35,71	

Tabel 32. Capaian Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-14		Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	100	23	35,71	0	100	0	100	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 33. Perbandingan realisasi Persentase layanan dukungan manajemen internal dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	23	35,71	155,26
2	BPPP Tegal	23	35,71	155,26
3	BPPP Ambon	23	35,71	155,26
4	BPPP Bitung	23	35,71	155,26

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini dengan mengetahui Progres capaian IKU triwulanan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penyusunan laporan yang merupakan bagian dari layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi tersebut telah didukung dengan ketersediaan anggaran yang memadai sehingga efektifitas dan efisiensi dalam pemenuhan dokumen tersebut dapat dilakukan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh dokumen yang telah ditargetkan dapat terpenuhi dengan baik.

Indikator Kinerja 15

Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi (nilai).

Merupakan indikator yang menunjukkan keselarasan antara dokumen Laporan Kinerja (LKJ), Target Kinerja dan Cara Pencapaian Kinerja dari masing-masing indikator yang diperjanjikan dalam PK dengan perhitungan dilakukan pada akhir tahun.

Penghitungan Nilai Rekonsiliasi Data Kinerja dilakukan pada 3 (tiga) aspek yaitu:

- a. Aspek Kepatuhan (A-I) : Aspek kepatuhan dilakukan dengan melakukan penilaian pada ketersediaan dokumen yang dibutuhkan yang meliputi : PK, Manual IKU, Rincian Target IKU, Renaksi, LKJ/LCK TW I s.d III dan data dukung LKJ/LCK TW III

- b. Aspek Kesesuaian (A-II) : Aspek kesesuaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai kesesuaian dokumen pada kriteria kesesuaian target, kesesuaian realisasi dan kesesuaian informasi data
- c. Aspek Ketercapaian (A-III) : Aspek ketercapaian dilakukan dengan melihat rata-rata nilai pencapaian IKU + IK pada TW I, TW II dan TW III Tahun 2022 pada aplikasi kinerjajaku

Sampai akhir triwulan I tahun 2023, BPPP Banyuwangi telah masih menunggu jadwal penilaian rekonsiliasi kinerja yang dilakukan oleh Sekertaris BRSDM KP sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 36. Capaian Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-16		Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
97,61	96,24	92	0	0	0	92	0	92	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 37. Perbandingan realisasi Nilai Rekonsiliasi Kinerja dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pembuatan seluruh dokumen dan laporan untuk dapat meningkatkan aspek-aspek kinerja pada sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh pemenuhan dokumen dan laporan harus memiliki konsistensi kepatuhan dalam

penyusunan sesuai dengan format yang telah ditetapkan. SDM yang menangani pemenuhan rekonsiliasi kinerja pun telah memiliki pemahaman yang baik terkait pemenuhan IKU tersebut dengan mengikuti kegiatan pra rekonsiliasi kinerja yang diselenggarakan oleh Sekertaris BRSDM KP.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2022.

Indikator Kinerja 16

Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%).

Sistem Manajemen Pengetahuan adalah suatu rangkaian yang memanfaatkan teknologi informasi yang digunakan oleh instansi pemerintah ataupun swasta untuk mengidentifikasi, menciptakan, menjelaskan, dan mendistribusikan pengetahuan untuk digunakan kembali, diketahui dan dipelajari. Jumlah unit kerja yang tergabung dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix* dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 100 % dan tahun 2018 sebesar 100%, tahun 2019 sebesar 100%, tahun 2020 sebesar 100% dan tahun 2021 sebesar 100%. Sampai akhir triwulan I Tahun 20223 BPPP Banyuwangi memperoleh nilai hasil perhitungan IKU ini oleh Puslat KP dan diperoleh nilai sebagai berikut :

- = Pemenuhan Dokumen MP yang sudah diupload dalam aplikasi Btrix + Keikutsertaan MP dalam aplikasi Btrix +Keaktifan MP dalam aplikasi Btrix
- = 20 + 40+ 40
- = 100%

Dari target sebesar 92% pada triwulan I tahun 2023, Perolehan nilai tersebut dikarenakan keaktifan para pejabat dalam menshare manajemen pengetahuan secara kontinyu pada aplikasi Bitrix KKP dan

pemenuhan dokumen kinerja yang diupload pada aplikasi Bitrix KKP sehingga persentase didapat sebesar 108,70%.

Tabel 38. Capaian Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-17		Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
100	100	92	100	108,70	0	92	0	92	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 39. Perbandingan realisasi unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	108,70	108,70	100
2	BPPP Tegal	108,70	108,70	100
3	BPPP Banyuwangi	108,70	108,70	100
4	BPPP Bitung	108,70	108,70	100

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah jaringan internet yang memadai dalam media yang *menshared* data sesuai dengan data yang di distribusikan dalam aplikasi *Btrix* dengan perhitungan dilakukan setiap triwulan

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, maka BPPP Banyuwangi dapat melakukan Efisiensi anggaran terkait pemenuhan IKU ini, Subkoordinator Program dan Monev akan mengupload rekapan seluruh pejabat dan operator yang sudah memenuhi data pada aplikasi *Btrix* melalui WA grup yang dapat terbaca oleh seluruh pejabat dan operator untuk dapat ditindaklanjuti dengan segera.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, Subkoordinator Program dan Monev secara rutin merekap seluruh pejabat dan operator yang tergabung pada media aplikasi *Btrix* sebelum akhir bulan berjalan pada WA grup Balai dan mengingatkan kepada pejabat dan operator yang belum mengupload data agar dapat segera mengupload pada akun masing-masing.

Indikator Kinerja 17

Indeks profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks).

Indeks profesionalitas ASN dimaksud terdiri dari Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap Pejabat yang telah dilakukan Asesmen. IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 81,51 % dan tahun 2018 sebesar 93,25%, tahun 2019 sebesar 75,88%, tahun 2020 sebesar 74,60%, tahun 2021 sebesar 74,60% dan tahun 2022 sebesar 83,39%. Perhitungan ini juga dapat dilihat melalui website <http://ropeg.kkp.go.id:4080/?#/ip-asn/eselon> dengan perhitungan nilai sebagai berikut :

= Indeks kualifikasi pendidikan ASN + Indeks disiplin ASN + Indeks kinerja ASN + Indeks kompetensi ASN

Perhitungan IKU ini dilaksanakan setiap semesteran.

Realisasi capaian IKU Indeks profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi pada tahun 2022 sebesar 83,39% atau melebihi dari target sebesar 76%. Apabila dibandingkan dengan capaian tahun 2020 sebesar 74,60% mengalami peningkatan sebesar 8,79 dan dibandingkan dengan capaian 2021 sebesar 74,60%, mengalami peningkatan sebesar 8,79.

IKU ini direalisasikan setiap semester sehingga realisasi capaian IKU pada triwulan I tahun 2023 masih 0.

Tabel 40. Capaian Indeks profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-18		Indeks profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
77,18	80,67	77	0	0	0	77	0	77	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 41. Perbandingan realisasi Indeks profesionalitas ASN dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah dukungan seluruh pegawai di lingkup BPPP Banyuwangi, operator simpeg dan pengelola kepegawaian lainnya. Untuk mendapatkan data-data terkini, masing-masing pegawai dapat mengunggah dokumen bukti diklat-diklat yang diikuti dan melakukan entri data diklat atau seminar yang diikuti, atau menyerahkan kepada operator simpeg untuk dilakukan entri data sehingga nilai kompetensi pegawai dapat sesuai. Media sosial *Whatsapp* menjadi salah satu alat komunikasi untuk penyampaian pemutakhiran data, dan memonitor pergerakan nilai sehingga target IKU ini dapat tercapai.

Meskipun di tengah situasi pandemi COVID-19, namun dengan berbagai upaya target Nilai IP ASN BPPP Banyuwangi ini diharapkan dapat tercapai. Salah satu upaya yang dilakukan adalah penyelenggaraan pelatihan-pelatihan secara daring. Berdasarkan hal tersebut, maka

peningkatan atau keberhasilan tercapainya target Nilai IP ASN BPPP Banyuwangi ini antara lain disebabkan oleh:

1. Terdapat pegawai lingkup BPPP Banyuwangi yang mendapatkan peningkatan pendidikan, sehingga kualifikasi pendidikannya meningkat;
2. Peningkatan kompetensi melalui pelatihan-pelatihan dan seminar daring;
3. Komitmen pimpinan dan kesadaran untuk meningkatkan kompetensi secara daring;
4. Kesadaran pegawai untuk menyampaikan sertifikat pengembangan kompetensi kepada pengelola kepegawaian; dan

Keaktifan pengelola kepegawaian dalam mengingatkan dan memutakhirkan data peningkatan kompetensi maupun pendidikan.

Indikator Kinerja 18

Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Banyuwangi Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi TA 2022 (%).

Merupakan indikator batas tertinggi presentase temuan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan BPPP Banyuwangi dibandingkan realisasi tahun 2021.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2018, realisasi pada tahun 2018 sebesar 0 %, pada tahun 2019 juga sebesar 0%, pada tahun 2020 sebesar 0,01%, pada tahun 2022 sebesar 0,01% dan pada tahun 2022 sebesar 0%.

Salah satu untuk menciptakan pengelolaan yang bersih adalah pemeriksaan rutin oleh BPK. Pelaksanaan pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dilakukan dalam rangka menciptakan pemerintahan yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.

IKU ini merupakan hasil penilaian dari level atasannya yaitu dari BRSDM KP yang dihitung akhir tahun 2023. Perhitungan ini berdasarkan total temuan nilai kepatuhan dibandingkan dengan pagu total yang bersifat minimize artinya semakin kecil realisasi dibandingkan dengan target maka semakin besar pula nilai capaian kinerja yang diperoleh sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 42. Capaian Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Banyuwangi Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi TA 2022

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-19		Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Banyuwangi Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi TA 2022							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
≤1	0	1	0	0	0	1	0	1	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 43. Perbandingan realisasi Batas Tertinggi Persentase Nilai Temuan LHP BPK Atas LK BPPP Banyuwangi Dibandingkan Realisasi Anggaran BPPP Banyuwangi TA 2022 dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan yang telah ditetapkan.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, mengingat seluruh penggunaan anggaran yang dipertanggungjawabkan sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap

triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progress yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 19

Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)

Jumlah rekomendasi hasil pengawasan BPPP Banyuwangi yang terbit pada periode Triwulan IV Tahun 2022 s.d. Triwulan III Tahun 2023 yang telah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) oleh unit Eselon I lingkup KKP.

Cara perhitungan IKU ini dengan cara Rekomendasi hasil pengawasan BPPP Banyuwangi (Audit, Reviu, dan Evaluasi) yang sudah ditindaklanjuti secara tuntas (status tindak lanjut adalah TUNTAS) sebanyak 70% dari seluruh rekomendasi yang diberikan selama periode pengukuran.

$$\% \text{ Rekomendasi} = \frac{\text{Jumlah Rekomendasi Hasil Pengawasan BPPP Banyuwangi}}{\text{Jumlah Rekomendasi Yang Sudah Ditindaklanjuti Secara Tuntas}} \times 100\%$$

Pada triwulan I BPPP Banyuwangi tidak termasuk kedalam satuan kerja yang tidak menjadi uji petik BPPP Banyuwangi maka nilai capaian IKM ini sebesar target yang ditetapkan (75%).

Tabel 44. Capaian Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-20		Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
0	100	75	75	100	0	75	100	75	100

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 45. Perbandingan realisasi Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	100	100	100
2	BPPP Tegal	100	100	100
3	BPPP Banyuwangi	100	100	100
4	BPPP Bitung	100	100	100

Indikator Kinerja 20

Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Banyuwangi (Nilai)

Nilai PM SAKIP Satker dihitung berdasarkan Permen PAN dan RB Nomor 88 Tahun 2021 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi SAKIP. Terdapat 4 aspek penilaian di dalam evaluasi atas implementasi SAKIP, yakni perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (30%), pelaporan kinerja (15%), dan evaluasi kinerja (25%). Nilai PM SAKIP Unit Eselon I merupakan ukuran perkembangan implementasi SAKIP di Satker .

IKU ini merupakan IKU baru yang ada pada tahun 2023, cara perhitungannya dengan menghitung nilai yang dikeluarkan dari hasil penilaian mandiri dari Tim SAKIP BRSDM.

Sampai pada akhir triwulan I tahun 2023, BPPP Banyuwangi masih dalam tahap penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP sehingga nilai pencapaiannya pada akhir triwulan I tahun 2023 adalah 0

Tabel 48. Capaian Unit Kerja BPPP Banyuwangi Yang Menerapkan Inovasi Pelayanan Publik

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-22		Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
0	0	1	0	0	0	0	0	1	0

Realisasi kinerja IKU belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 49. Perbandingan realisasi Nilai PM SAKIP BPPP Banyuwangi dengan BPPP Lingkup
BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah adanya aplikasi Kinerjaku yang telah memuat menu template penilaian mandiri SAKIP sehingga memudahkan dalam penyusunan dokumen penilaian mandiri SAKIP.

Analisis atas efisiensi penggunaan sumberdaya pada pelaksanaan IKU ini sebagai berikut:

1. Aplikasi Kinerjaku yang memuat menu template penilaian mandiri SAKIP
2. Operator yang menangani penilaian mandiri SAKIP dan Kinerjaku masih petugas yang sama sehingga memudahkan pemahaman pemenuhan dokumen penilaian mandiri SAKIP BPPP Banyuwangi.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki beberapa kegiatan strategis, diantaranya:

1. Dokumen penilaian mandiri SAKIP telah disusun dari awal tahun sebagai dokumen persyaratan pemenuhan dokumen Kinerja per triwulan
2. Penyimpanan dokumen penilaian mandiri SAKIP terletak pada Google Drive milik BPPP Banyuwangi

Indikator Kinerja 21

Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Banyuwangi (nilai).

Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, tahun 2020 sebesar 92,83%, tahun 2021 sebesar 97,44% dan tahun 2022 sebesar 94,48%

Terdapat 12 indikator penilaian yaitu: Pengelolaan UP, Data Kontrak, Kesalahan SPM, Retur SP2D, Hal III DIPA, Revisi DIPA, Penyelesaian tagihan Rekon LPJ, Renkas, Realisasi, PAGU Minus dan Dispensasi SPM.

Perolehan nilai ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi OM SPAN BPPP Banyuwangi dan capaiannya dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 50. Capaian Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-23		Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
97,44	94,48	89	0	0	0	89	0	89	0

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 51. Perbandingan realisasi Nilai kinerja pelaksanaan anggaran dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Faktor penunjang keberhasilan dalam pencapaian kinerja IKU ini adalah tersedianya SOP terkait pengisian aplikasi OM SPAN yang merupakan bagian dari Nilai kinerja pelaksanaan anggaran BPPP Banyuwangi.

Dengan adanya kegiatan strategis yang telah dilakukan tersebut, progres capaian IKU tahunan dapat terpantau dengan baik dan sesuai dengan SOP yang telah ditetapkan, pengisiap aplikasi OM SPAN oleh SDM yang memiliki kompetensi dibidangnya turut memberikan kontribusi yang baik terhadap pemenuhan capaian IKU tersebut.

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

Indikator Kinerja 22

Nilai kinerja anggaran BPPP Banyuwangi (nilai).

Nilai Kinerja anggaran adalah proses menghasilkan suatu nilai capaian kinerja untuk setiap indikator yang dilakukan dengan membandingkan data realisasi dengan target yang telah direncanakan sebelumnya.

IKU ini merupakan IKU yang sudah ada pada tahun 2017 dengan realisasi sebesar 90,50%, tahun 2018 sebesar 86,83%, pada tahun 2019 sebesar 95,39%, pada tahun 2020 sebesar 92,03%, pada tahun 2021 sebesar 85,58% dan pada tahun 2022 sebesar 86,99%

Perhitungan ini berdasarkan perhitungan pada aplikasi SMART DJA dan capaiannya dilakukan pada akhir tahun 2023 sehingga nilai pencapaiannya masih 0.

Tabel 52. Capaian Nilai kinerja anggaran BPPP Banyuwangi

SK-1		Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi							
IKU-24		Nilai kinerja anggaran BPPP Banyuwangi							
Realisasi		2023				Rensta BPPP Banyuwangi			
2021	2022	Target	Realisasi	% Capaian	% Kenaikan 2022-2023	Target 2023	% Capaian Thd Target 2023	Target 2024	% Capaian thd Target 2024
85,58	86,99	81	0	0	0	81	0	81	0

Realisasi kinerja IKU ini belum dapat dibandingkan dengan standar nasional karena belum menemukan institusi yang memiliki kompetensi yang sepadan, maka perbandingan dilakukan dengan BPPP Lingkup BRSDM KP, dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 53. Perbandingan realisasi Nilai kinerja anggaran dengan BPPP Lingkup BRSDM KP

No.	Nama Satker	% Capaian Satker	% Capaian BPPP Banyuwangi	Perbandingan % Capaian
1	BPPP Medan	0	0	0
2	BPPP Tegal	0	0	0
3	BPPP Banyuwangi	0	0	0
4	BPPP Bitung	0	0	0

Dalam menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja tersebut pada akhir triwulan I Tahun 2023, BPPP Banyuwangi melakukan rapat monitoring dan evaluasi capaian kinerja setiap triwulan dan memastikan seluruh IKU yang merupakan IKU tahunan telah memiliki progres yang nantinya dapat diselesaikan pada akhir tahun 2023.

3.3 Akuntabilitas Keuangan

Realisasi Belanja Negara pada Bulan Maret TA 2023 adalah sebesar Rp15.867.483.637 atau mencapai 17,45 persen dari alokasi anggaran sebesar Rp90.926.508.000,00. Ringkasan Laporan Realisasi Anggaran sampai dengan 31 Maret 2023 dapat disajikan pada tabel berikut :

Tabel 54. Realisasi anggaran sampai dengan tanggal 31 Maret 2023

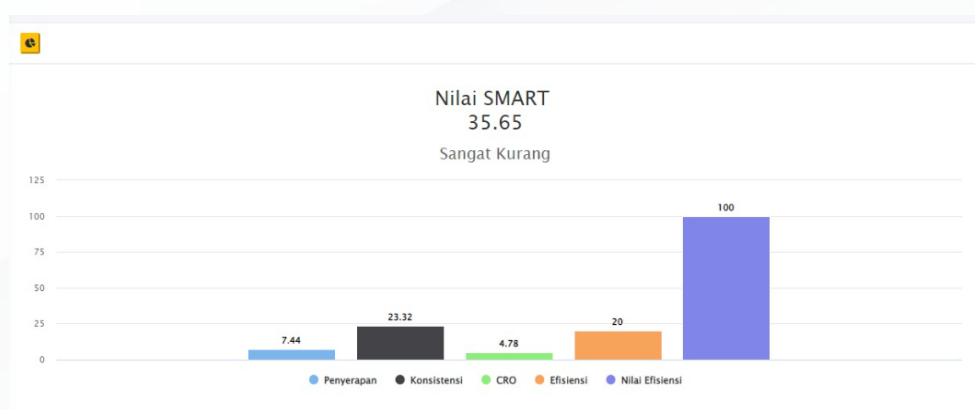
KODE	URAIAN	PAGU	REALISASI	%	SISA ANGGARAN
32.12	PROGRAM RISET SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN	90,926,508,000			
<i>032.12.DL</i>	<i>Program Pendidikan dan Pelatihan Vakasi</i>				
2375	Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	17,848,880,000	3,263,229,579	18,28	14,501,515,421
2375.ABW	Kebijakan Bidang Kemaritiman dan Kelautan (Base Line)	120,000,000	0	0	120,000,000
2375.DCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	54,000,000	11,328,000	20,98	42,672,000
2375.QDD	Fasilitasi dan Pembinaan Kelompok Masyarakat (Base line)	10,351,880,000	1,337,068,988	12,92	9,014,811,012
2375.RAL	Sarana Bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	830,000,000	418,100,000	50,37	411,900,000
2375.RBQ	Prasarana bidang kemaritiman, kelautan dan perikanan (Base Line)	770,000,000	53,200,000	6,91	716,800,000
2375.SCC	Pelatihan Bidang Pertanian dan Perikanan (Base Line)	5,723,000,000	1,443,532,591	25,22	4,195,332,409
<i>032.12.WA</i>	<i>Program Dukungan Manajemen</i>				
2378	Dukungan Manajemen Internal Lingkup Badan Riset dan Sumber Daya Manusia Kelautan dan Perikanan	72,921,162,000	12,585,632,297	17,26	60,135,531,703
2378.EBA	Layanan Dukungan Manajemen Internal	72,872,762,000	12,515,829,837	17,22	59,946,334,163
2378.EBD	Layanan Perencanaan dan Penganggaran Internal	48,400,000	0	0	48,400,000

Secara umum kinerja BPPP Banyuwangi triwulan I tahun 2023 telah dilaksanakan dan capaian kinerja yang dihasil tercapai secara optimal. Namun demikian secara teknis masih tetap perlu dilakukan optimasi pelaksanaan kegiatan seperti sosialisasi kepada penyuluh PNS dan PPB Satminkal BPPP Banyuwangi tentang mekanisme pembayaran BOP sehingga anggaran BOP Penyuluh PNS dan PPB dapat dibayarkan penuh setiap bulannya.

3.4 Efisiensi Anggaran BPPP Banyuwangi

Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi sebagai organisasi sektor publik dituntut untuk memperhatikan *value for money* dalam menjalankan aktivitasnya. Tujuan yang dikehendaki masyarakat mencakup pertanggungjawaban mengenai pelaksanaan yaitu ekonomis dalam pengadaan dan alokasi sumber daya, efisien dalam penggunaan sumber daya dalam arti penggunaannya diminimalkan dan hasilnya dimaksimalkan, serta efektif dalam arti mencapai tujuan dan sasaran (*maximizing benefits and minimizing costs*), serta efektif (berhasil guna) dalam arti mencapai tujuan dan sasaran.

Penghitungan efisiensi anggaran dapat dilihat pada aplikasi SMART yaitu dengan membandingkan capaian output dengan penyerapan anggaran. Dasar hukum terkait penghitungan efisiensi terdapat pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 22/PMK.02/2021 tentang Pengukuran dan Evaluasi Kinerja Anggaran atas Pelaksanaan Rencana Kerja dan Anggaran.



Gambar 17. Nilai efisiensi pada aplikasi SMART

Efisiensi anggaran BPPP Banyuwangi pada triwulan I Tahun 2023 memperoleh skor 20. Efisiensi anggaran menunjukkan perolehan positif dari rentang nilai efisiensi +20 sampai dengan -20. Kondisi ini dipengaruhi oleh Nilai pencapaian Seluruh target IKU pada Triwulan I Tahun 2023 telah pencapaian 100%, Pencapaian nilai efisiensi sebesar 20 menunjukkan bahwa di dalam pelaksanaan anggaran triwulan I Tahun 2023, terdapat efisiensi baik efisiensi keluaran maupun efisiensi kegiatan telah berjalan dengan baik. Kondisi ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawalan secara baik dalam rangka peningkatan kinerja dan konsistensi terhadap pelaksanaan anggaran di tahun berikutnya.

Terdapat 4 (empat) alur tahapan untuk mencapai efisiensi anggaran pada BPPP Banyuwangi yaitu;

- a. Perencanaan, efisiensi anggaran dilakukan BPPP Banyuwangi dalam beberapa dimensi, yaitu:
- b. Dimensi efisiensi pertama mengutamakan manfaat. Oleh karena itu dibuat inisiatif strategis berupa indikator outcome dan pengawalannya.

Dimensi efisiensi kedua menetapkan prioritas kegiatan. Pada tahun 2022 BPPP Banyuwangi telah menetapkan kegiatan prioritas yang pengawalannya dilakukan secara rutin (*weekly report*) dan berkala (pembahasan bulanan) untuk mendapatkan rekomendasi memadai.

Dimensi efisiensi ketiga berupa pemangkasan alokasi anggaran perjalanan dinas dan pertemuan. dialihkan kepada kegiatan yang langsung dapat dirasakan manfaatnya oleh masyarakat dalam hal ini dukungan untuk prioritas nasional/KKP dalam rangka peningkatan produksi budidaya. Disamping itu, pada masa pandemi Covid-19, pos-pos anggaran yang tercatat berlebih diantaranya belanja pegawai dialihkan untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 beserta dampaknya.

- c. Pelaksanaan, strategi pelaksanaan kegiatan untuk efisiensi terutama dalam hal perjalanan dinas/paket meeting, sehingga volume capaian dapat melebihi target atau dipergunakan untuk output baru. Implementasi efisiensi ini diantaranya berupa:
 - Menyelenggarakan pelatihan dan penyuluhan berbasis daring;
 - Melaksanakan koordinasi, sosialisasi, supervisi, dan evaluasi dilaksanakan secara daring dan blended (tatap muka dan daring);

-
- Melaksanakan sosialisasi dan pembinaan dilaksanakan secara digitalisasi melalui video conference *dan live streaming*;
 - Melaksanakan kegiatan sesuai Perjanjian Kinerja dengan pimpinan berbasis *Balance Score Card* dan SKP;
 - Membayarkan biaya operasional Penyuluh Perikanan PNS dan PPB sesuai kinerja yang dilaporkan dan sepengetahuan Kepala Dinas KP sebagai pengguna.
 - Melaksanakan kegiatan penyuluhan dalam rangka mendukung program prioritas Eselon I KKP.

d. Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi

- Melaksanakan pengawalan pengelolaan anggaran agar tepat Penggunaan dan sesuai aturan perundangundangan secara rutin dan berkala. Efisiensi pemantauan secara rutin dan berkala melalui aplikasi dan digitalisasi mempercepat dan mempermudah memperoleh informasi dan hasil pengukuran sehingga pimpinan mendapatkan gambaran kondisi pelaksanaan kegiatan dan pengelolaan anggaran dan segera memberikan rekomendasi kebijakan bila diperlukan. Aplikasi yang dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja yaitu SMART DJA Bappenas, OM SPAN DJPB Kemenkeu, E-Monev Bappenas, E-Dalwas KKP, Kinerjaku KKP, E-Pegawai KKP, serta Dashboard dan Weekly Report BPPP Banyuwangi;
- Membayarkan Tunjangan Kinerja Pegawai sebagai bentuk insentif atas kinerja/kontribusi yang diberikan pada organisasi, dibayarkan berdasarkan capaian kinerja dan progress kerja disamping presensi kehadiran.

e. Penyesuaian

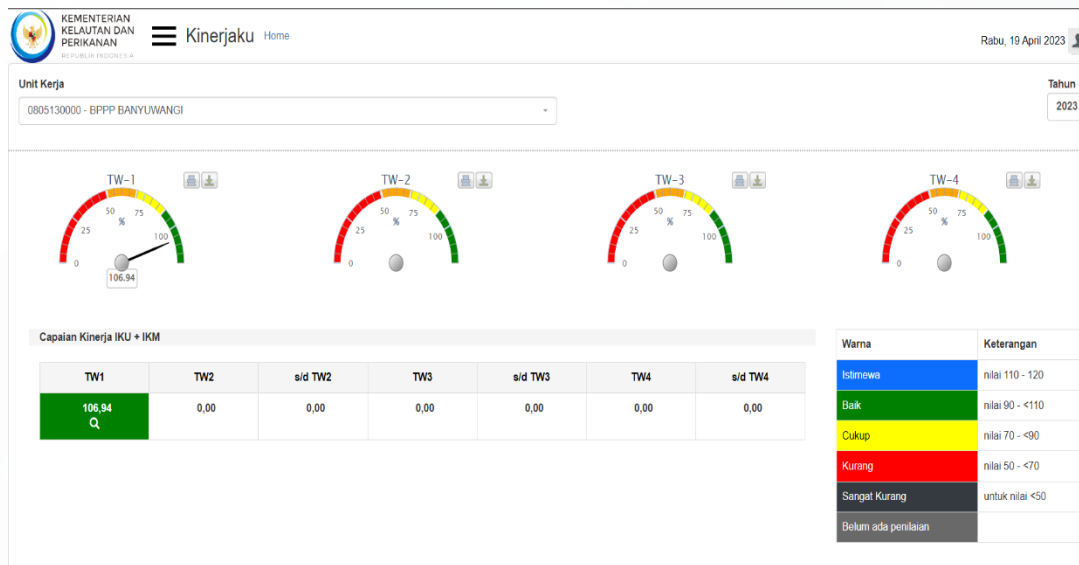
Pelaksanaan revisi indikator, target/volume kinerja dan anggaran dilakukan bila dari hasil revidu diperlukan perubahan, penambahan, dan pergeseran bila diperlukan dalam pencapaian tujuan organisasi. BPPP Banyuwangi melakukan beberapa penyesuaian diantaranya melakukan proses identifikasi dan revisi 1) mendukung program prioritas nasional dalam rangka peningkatan produksi budidaya, 2) pergeseran output belanja pegawai untuk kebutuhan penanggulangan Covid-19 di lingkup KKP, 3) belanja perjalanan

di internal BPPP Banyuwangi untuk mendukung kegiatan pemulihan ekonomi nasional dampak Covid-19 (pelatihan masyarakat).

BAB IV PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Pada akhir triwulan I tahun 2023, BPPP Banyuwangi memiliki tanggung jawab untuk mewujudkan 22 Indikator Kinerja Utama. Pengukuran capaian kinerja BPPP Banyuwangi triwulan I tahun 2023 dilakukan dengan cara membandingkan antara target (rencana) dan realisasi indikator kinerja utama (*key performance indikator*, disingkat KPI) pada masing-masing perspektif. Pencatatan dan pengukuran kinerja dilakukan dengan bantuan perangkat lunak berbasis *balanced scorecard* dari Kementerian Kelautan Perikanan, yaitu pada <http://kinerjaku.kkp.go.id>. Dari hasil pengukuran kinerja tersebut, diperoleh data capaian Nilai Kinerja Organisasi (NKO) BPPP Banyuwangi sebesar 106,94%, sebagaimana dashboard kinerjaku sebagai berikut:



Gambar 18. Dashboard Kinerjaku Level 3 BPPP Banyuwangi

Selama triwulan I tahun 2023, dari 9 IKU yang menjadi target triwulan I tahun 2023 BPPP Banyuwangi, dan semua telah sesuai dengan target yang ditetapkan dan melebihi target yang telah ditetapkan. Rincian target dan realiasi dari 22 IKU tersebut adalah:

Tabel 56. Capaian IKU BPPP Banyuwangi triwulan I tahun 2023

NO	Sasaran Kegiatan	No	Indikator Kinerja	Target Tahunan	Target TW 1	Realisasi	% Realisasi
Kegiatan 1. Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan							
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%)	70	0	0	0
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (Orang)	5.990	1.590	2.074	120
		3	Nilai PNBP Satker BPPP Banyuwangi (Rupiah Milyar)	1,420	0,11	0,12	109,9
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP Yang Bersertifikat Kompetensi di BPPP Banyuwangi (Orang)	90	20	20	100
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk <i>start up</i> (usaha rintisan) di BPPP Banyuwangi (Orang)	36	0	0	0
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widya di BPPP Banyuwangi (Paket)	2	0	0	0
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.100	1300	1507	115,92
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)	270	0	0	0
		9	Kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di Satminkal BPPP Banyuwangi (Kelompok)	434	78	78	100
		10	Tenaga kerja yang terlibat Satker BPPP Banyuwangi (Orang)	1.930	0	0	0
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas) (Paket)	1	0	0	0
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan KP	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	0	0	0

		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (Unit)	1	0	0	0
Kegiatan 2. Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM							
1	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen BPPP Banyuwangi	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100	30	35,71	120
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi (Nilai)	92	0	0	0
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%)	92	92	100	108,70
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	77	0	0	0
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Banyuwangi dibandingkan realisasi anggaran BPPP Banyuwangi TA 2022 (%)	0,5	0	0	0
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yang dimanfaatkan untuk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	75	75	75	100
		20	Nilai PM SAKIP Lingkup BPPP Banyuwangi (Nilai)	75.0	0	0	0
		21	Nilai Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (nilai)	89	0	0	0
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	81	0	0	0

4.2 Permasalahan dan Rekomendasi

Berdasarkan hasil evaluasi rencana aksi tahun 2022 capaian kinerja tahun 2022, IKU dengan Target Kinerja Tahunan yang diprediksi tidak tercapai target kinerjanya dikarenakan kurang termonitor setiap triwulannya. Maka dari itu Indikator Kinerja Utama yang memiliki target tahunan tetap harus dimonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan. Penanggung jawab IKU

agar memastikan bahwa capaian akhir tahun dapat dicapai dengan baik sesuai target yang telah ditetapkan.

Laporan Kinerja ini diharapkan dapat memberikan informasi secara transparan dan akuntabel bagi seluruh *stakeholders* BPPP Banyuwangi. Laporan ini juga menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan pengelolaan kinerja BPPP Banyuwangi. Akhirnya, BPPP Banyuwangi berharap dapat terus meningkatkan kontribusi untuk mewujudkan Kesejahteraan Masyarakat KP.



**KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA
KELAUTAN DAN PERIKANAN**

JALAN MEDAN MERDEKA TIMUR NOMOR 16
JAKARTA 10110 KOTAK POS 4130 JKP 10041
TELEPON (021) 3519070 (LACAK), FAKSIMILE (021) 3513287
LAMAM www.kkp.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Achmad Subijakto**
Jabatan : Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Selanjutnya disebut **pihak pertama**

Nama : **Lilly Aprilya Pregiwati**
Jabatan : Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan

Selaku atasan pihak pertama, selanjutnya disebut **pihak kedua**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua

Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan
Kelautan dan Perikanan

Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama

Kepala Balai Pelatihan dan
Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

Achmad Subijakto

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI

NO	SASARAN KEGIATAN BPPP BANYUWANGI	NO	IKU	TARGET 2023
1	Terselenggaranya Pelatihan SDM Kelautan dan Perikanan	1	Persentase Lulusan pelatihan yang terserap di Dunia Usaha dan Dunia Industri di BPPP Banyuwangi (%)	70
		2	Masyarakat Kelautan dan Perikanan yang dilatih di BPPP Banyuwangi (orang)	5.990
		3	Nilai PNPB BPPP Banyuwangi (Rupiah Miliar)	1,420
2	Terselenggaranya Sertifikasi SDM Kelautan dan Perikanan	4	Jumlah SDM KP yang bersertifikat kompetensi di BPPP Banyuwangi (orang)	90
3	Terselenggaranya Kaji Terap Pelatihan KP	5	Lulusan pelatihan yang membentuk start up (usaha rintisan) di BPPP Banyuwangi (orang)	36
		6	Tersedianya Materi Pelatihan berbasis Kaji Widy di BPPP Banyuwangi (paket)	2
4	Terselenggaranya Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	7	Jumlah Kelompok Pelaku utama/ Pelaku Usaha yang disuluh di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	6.100
		8	Kelompok kelautan dan perikanan yang ditingkatkan kelasnya di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	270
		9	kelompok kelautan dan perikanan yang dibentuk di BPPP Banyuwangi (Kelompok)	434
		10	Tenaga kerja yang terlibat di BPPP Banyuwangi (orang)	1.930
5	Terselenggaranya Percontohan Penyuluhan KP	11	Desa/kawasan mitra yang menerapkan Iptek KP di BPPP Banyuwangi (Desa Perikanan Cerdas)	1
6	Tersedianya Sarana dan Prasarana Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan	12	Jumlah Sarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	1
		13	Jumlah Prasarana pelatihan dan penyuluhan KP yang terstandar di BPPP Banyuwangi (unit)	1
7	Terpenuhinya Layanan Dukungan Manajemen Eselon I dan Satker	14	Persentase layanan dukungan manajemen internal BPPP Banyuwangi (%)	100
		15	Nilai Rekonsiliasi Kinerja BPPP Banyuwangi (Nilai)	92
		16	Persentase unit kerja yang menerapkan sistem manajemen pengetahuan yang terstandar BPPP Banyuwangi (%)	92
		17	Indeks Profesionalitas ASN BPPP Banyuwangi (indeks)	77
		18	Batas tertinggi persentase nilai temuan LHP BPK atas LK BPPP Banyuwangi dibandingkan realisasi anggaran BPPP Banyuwangi TA. 2022 (%)	0,5
		19	Rekomendasi hasil pengawasan yg dimanfaatkan utk perbaikan kinerja BPPP Banyuwangi (%)	75
		20	Nilai PM SAKIP BPPP Banyuwangi (Nilai)	77
		21	Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	89
		22	Nilai Kinerja Anggaran BPPP Banyuwangi (Nilai)	81

Data Anggaran

No	Kegiatan/ Sasaran Kegiatan	Anggaran
1	Kegiatan Pelatihan dan Penyuluhan KP	Rp 17.848.880.000
2	Kegiatan Dukungan Manajemen Internal Lingkup BRSDM	Rp 73.077.628.000
Total Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan		Rp 90.926,508,000

Jakarta, 10 Januari 2023

Pihak Kedua
Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan KP



Lilly Aprilya Pregiwati

Pihak Pertama
Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan
Perikanan Banyuwangi



Achmad Subijakto



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN RISET DAN SUMBER DAYA MANUSIA KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
JALAN RAYA SITUBONDO KM. 17 TROMOL POS 8 BANYUWANGI
TELEPON : 0333-510688, 510525 FAKSIMILE : 0333-510525
Email : bp3banyuwangi@yahoo.com

KEPUTUSAN
KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI
NOMOR : KEP. 98 / BRSDM-BPPP.BYW/II/2023

TENTANG

PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA
BALAI PELATIHAN DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI T.A. 2023

KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PERNYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI,

Menimbang :

- a. Bahwa dalam rangka pengelolaan kinerja di Balai pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi, maka dipandang perlu untuk menunjuk Tim Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi T.A. 2023 ;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi tentang Penunjukan Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi;

Mengingat :

- 1. Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 111), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 63 Tahun 2015 tentang Kementerian Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 2);
- 2. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 68/PERMEN-KP/2017 tentang Pedoman Pengelolaan Kinerja Organisasi di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 190);
- 3. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 57/PERMEN-KP/2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 17/PERMEN-KP/2020

tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan Tahun 2020-2024;

4. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 27/MEN/2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan;
5. Keputusan Kepala Badan Pengembangan SDM KP Nomor : 46/KEP-BPSDMKP/2014 Tanggal 20 Mei 2014 tentang Wilayah Kerja Balai Pendidikan dan Pelatihan Perikanan Banyuwangi;
6. Keputusan Kepala Balai Nomor KEP.02/BRSDM-BPPP.BYW/TU.210/I/2020 tanggal 02 Januari 2020 tentang Rencana Operasional Kegiatan (ROK) TA. 2023.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BALAI PELATIHAN DAN PERNYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI TENTANG PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA BALAI PELATIHAN DAN PERNYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI T.A. 2023.

KESATU : Membentuk Tim Teknis Pengelola Kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi yang selanjutnya disebut Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi, yang terdiri dari Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Kesekretariatan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tersebut dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KESATU : Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai Peta Jalan sebagaimana tersebut dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan.

KETIGA : Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU mempunyai tugas:

A. Pengarah

Memberikan arahan dan bimbingan kepada Penanggung Jawab dan Pelaksana dalam perumusan kebijakan dan pengambilan langkah-langkah strategis dalam rangka pelaksanaan tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

B. Penanggung Jawab

Bertanggung jawab terhadap tata kelola kinerja Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

C. Tim Kesekretariatan

1. Ketua

Melaksanakan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

2. Sekretaris

Memberikan dukungan teknis dan administratif kepada Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi.

3. Anggota

Mengoordinasikan perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja, dan verifikasi kinerja di lingkungan unit kerja yang bersangkutan untuk memastikan pengelolaan kinerja berjalan sesuai ketentuan serta melaporkan hasil kepada Ketua Tim Pelaksana Kesekretariatan.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi dapat melibatkan narasumber / pakar / praktisi / tenaga ahli / konsultan untuk memperkaya informasi dan teknologi aplikasi sesuai dengan kebutuhan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA, Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi bertanggung jawab dan menyampaikan laporan kepada Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi.

KELIMA : Masa kerja Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU terhitung mulai sejak tanggal 02 Januari 2023 sampai dengan 31 Desember 2023.

- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Kepala ini dibebankan kepada Anggaran Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi Tahun Anggaran 2023.
- KETUJUH : Keputusan Kepala Balai ini mulai berlaku sejak tanggal 02 Januari s.d. Desember 2023 dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dan perubahan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Banyuwangi
pada tanggal 06 Januari 2023



Kepala Balai,

Achmad Subijakto

Tembusan :

1. Kepala Badan Riset dan SDM kelautan dan Perikanan
2. Kepala Pusat Pelatihan dan Penyuluhan Kelautan dan Perikanan
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) di Banyuwangi
4. yang bersangkutan

Lampiran I Surat Keputusan Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan
Banyuwangi
Nomor : KEP.97/BRSDM-BPPP.BYW/HM.120/I/2023
Tanggal : 06 Januari 2023

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
PENUNJUKAN PENGELOLA KINERJA
BALAI PELATIH DAN PENYULUHAN PERIKANAN BANYUWANGI T.A. 2023**

A. Pengarah

Kepala Balai Pelatihan dan Penyuluhan Perikanan Banyuwangi

B. Penanggung Jawab

NO.	NAMA/JABATAN	BIDANG
1.	Candra Saputra, S.St.Pi, M.Si, Kepala Sub Bagian Tata Usaha	Tata Kelola Kinerja Manajerial
2.	Imawan Zuhron Abrori, S.T, M.T., Subkoordinator Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi	Tata Kelola Bidang Perencanaan Program, Anggaran dan Monev
3.	Yanuar Rustrianto Buwono, S.St.Pi, M.Si, Subkoordinator Kelompok Pelatihan	Tata Kelola Bidang Pelatihan
4.	Dian Tugu Warsito Taufik, S.St.Pi, M.P., Subkoordinator Kelompok Penyuluhan	Tata Kelola Bidang Penyuluhan

C. Tim Pelaksana Kesekretariatan

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	Luh Putu Yulni Darmiasih, S.Pi, Analisis Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan, Subkoordinator Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi	Ketua
2.	Firman Pra Setia Nugraha, S.St.Pi, Penyusun Rencana Program dan Anggaran , Subkoordinator Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi	Sekretaris
3.	Suliyati, S.Pi, Analisis Pengelola Keuangan, Sub Bagian Tata Usaha	Anggota 1
4.	Nuryana, S.Pi, Analisis Kepegawaian, Sub Bagian Tata Usaha	Anggota 1
5.	L. Umardani, Pelaksana Subkoordinator Kelompok Program, Monitoring dan Evaluasi	Anggota 2
6.	Hendra Dwi Kristiawan, S.STP, Pelaksana Sub Koordinator Kelompok Pelatihan	Anggota 3

NO.	JABATAN/NAMA	KEDUDUKAN DALAM TIM
7.	Astari Wiranti, S.Pi, MM, Pelaksana Sub Koordinator Kelompok Penyuluhan	Anggota 4
8.	Roni Paslah, S.St.Pi, Instruktur Pertama, Kelompok Jabatan Fungsional	Anggota 5
9.	Alfiola Rahmadani, A.Md.Ak Kelompok Tata Usaha	Anggota 6



Kepala Balai,

Achmad Subijakto

Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
4. mengoordinasikan proses pengukuran kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Anggota 3												
1. mengoordinasikan penyusunan laporan capaian kinerja (LCK) dan Laporan Kinerja (LKj) secara berkala (bulanan/triwulanan/semesteran/tahunan												
2. memastikan bahwa format dan substansi LKj telah disusun berdasarkan ketentuan												
3. memastikan LKj yang disusun telah dilengkapi dengan bukti/data pendukung yang cukup dan memenuhi unsur keterandalan												
4. memastikan LKj yang disusun disampaikan tepat waktu dan di <i>upload</i> ke dalam <i>website</i> resmi												
5. mengoordinasikan proses pelaporan kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Anggota 4												
1. melakukan evaluasi dan analisa atas hasil pengukuran dan pelaporan kinerja												
2. menyusun laporan hasil evaluasi program yang dilengkapi dengan rekomendasi dan alternatif perbaikan untuk perencanaan, pengendalian, dan peningkatan kinerja selanjutnya												
3. melakukan evaluasi proses pengelolaan kinerja secara keseluruhan (SAKIP) pada unit kerja di masing-masing sesuai ketentuan yang berlaku												
4. menyampaikan hasil evaluasi kepada pihak yang berkepentingan												
5. mengoordinasikan proses evaluasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												
Anggota 5												

Pengelola Kinerja BPPP Banyuwangi	Januari	Februari	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	September	Oktober	November	Desember
1. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan kinerja												
2. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pengukuran kinerja												
3. melakukan verifikasi data, informasi, dan dokumen hasil pelaporan kinerja												
4. memastikan seluruh <i>softcopy</i> data, informasi, dan dokumen hasil perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja serta dokumen lainnya yang diperlukan disampaikan pada sistem dokumentasi <i>online</i>												
5. mengoordinasikan proses verifikasi kinerja secara berjenjang pada unit organisasi masing-masing												



Kepala Balai,

Achmad Subijakto, A.Pi, M.P